



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019-2024**

**KABUPATEN MAGELANG  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. ENDRA ENDAH WACANA, M.M

NIP. : 19630908 198903 1 008

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasar SK Bupati Nomor 824/634/22/2018 tanggal 27 Desember Tahun 2018 bertugas untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

**Plt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**



**Drs. ENDRA ENDAH WACANA, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198903 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasa 28c ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat kedua urusan tersebut bersifat saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia. Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang.

Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk mensinergikan pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang maka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai salah satu bentuk upaya implementasi Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Magelang, terutama Misi ke 1 tentang Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama. Visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yaitu:

1. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia,
2. meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Disamping itu, agar penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun penetapan kegiatan dalam Rencana Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Magelang untuk menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 -2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah Kabupaten Magelang dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Magelang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
  - a. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

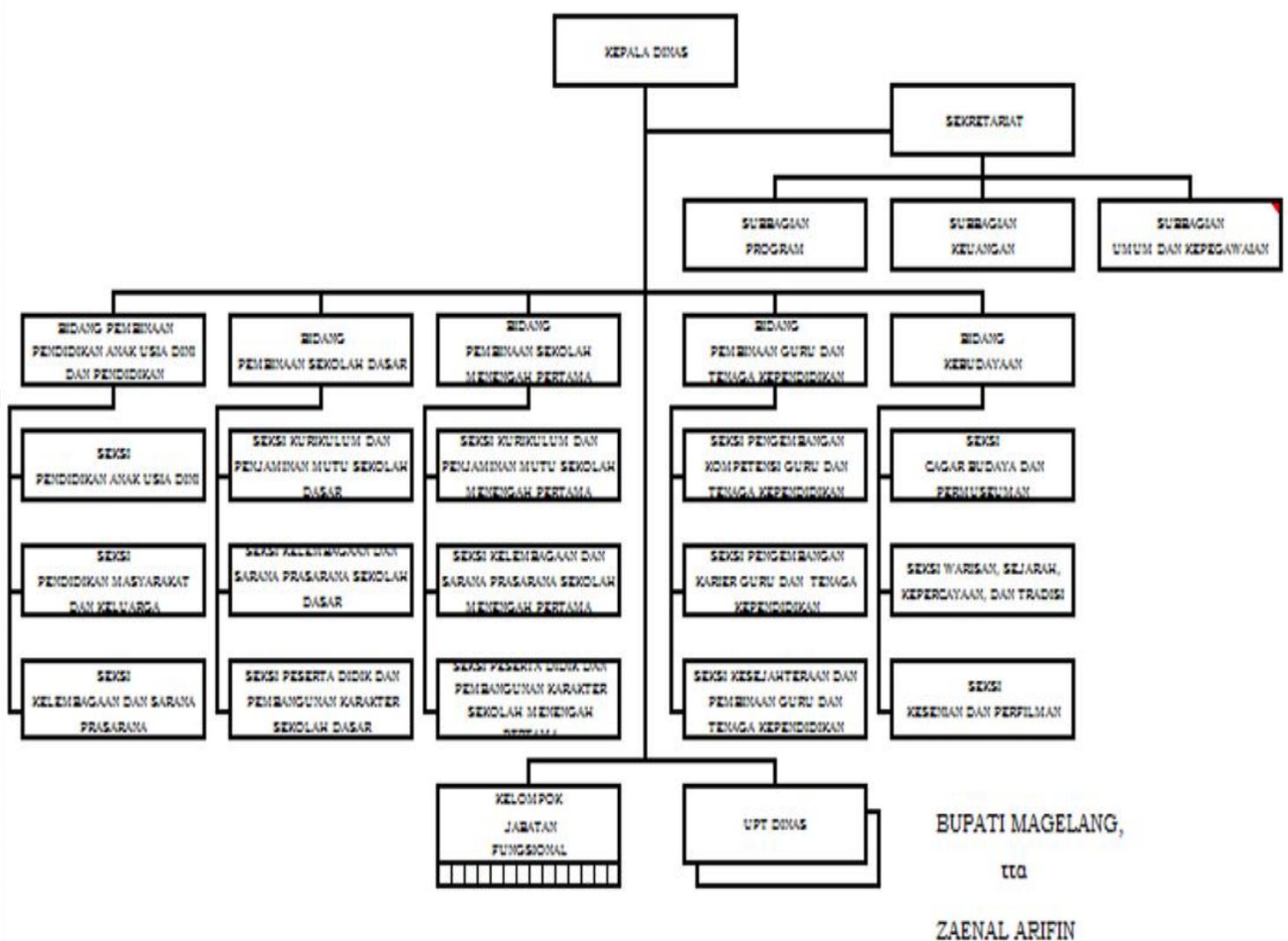
BAB VIII : PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

**2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Gambar 2.1  
Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Magelang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbag Program
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keluargasi
  3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi 3 (tiga) Seksi , yaitu :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
  2. Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan
  3. Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- f. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
  2. Seksi Warisan, Sejarah, Kepercayaan dan Tradisi
  3. Seksi Kesenian dan Perfilman

Rincian Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 10) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 11) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 13) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.

- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama.

- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan kompetensi,

pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan Karier guru dan tenaga kependidikan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan bidang guru dan tenaga kependidikan.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 9) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 10) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian dan perfilman.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penertiban izin membawa cagar budaya keluar kabupaten.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan museum kabupaten.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi di bidang kebudayaan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kebudayaan.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

### **2.2.1. Potensi SDM**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada awal tahun 2019, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak : 78 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 25 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
berdasarkan Kelompok Jabatan

| No            | Jabatan            |                   | Eselon | Kondisi Riil | Formasi |
|---------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|---------|
| 1             | 2                  |                   | 3      | 4            | 5       |
| 1             | Struktural         | Kepala Dinas      | II.A   | 0            | 1       |
|               |                    | Sekretaris        | III.A  | 0            | 1       |
|               |                    | Kepala Bidang     | III.B  | 4            | 6       |
|               |                    | Kepala Sub Bagian | IV.A   | 2            | 3       |
|               |                    | Kasi              | IV.A   | 13           | 15      |
| 2             | Jabatan Fungsional | Pengawas SMP      | -      | 4            | 8       |
| 3             | Fungsional Umum/   | Staf              | -      | 55           | 72      |
| <b>Jumlah</b> |                    |                   |        | 78           | 106     |

*Sumber : SubBag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang*

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 19 orang pejabat struktural dan 59 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mayoritas

merupakan lulusan S1 dan S2. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Magelang

| No.    | Uraian              | Jumlah (Orang) | Prosentase (%) |
|--------|---------------------|----------------|----------------|
| 1.     | Pasca sarjana (S.2) | 19             | 24,36          |
| 2.     | Sarjana (S.1)       | 33             | 42,31          |
| 3.     | Diploma 3/Akademi   | 9              | 11,54          |
| 4.     | SLTA                | 17             | 21,79          |
| 5.     | SLTP                |                |                |
| 6.     | SD                  |                |                |
| JUMLAH |                     | 78             | 100,00         |

*Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang*

Sedangkan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 52,54% dan golongan II sebanyak 36,44%. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Magelang Menurut Golongan

| No.    | Golongan     | Jumlah (Orang) | %      |
|--------|--------------|----------------|--------|
| 1.     | Golongan IV  | 19             | 24,36  |
| 2.     | Golongan III | 53             | 67,95  |
| 3.     | Golongan II  | 6              | 7,69   |
| 4.     | Golongan I   | 0              | 0      |
| JUMLAH |              | 78             | 100,00 |

*Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang*

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 41 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 61 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 27 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada

Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Magelang Menurut Jenis Kelamin

| No.    | Keterangan                           | Laki-Laki<br>(Orang) | Perempuan<br>(Orang) |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.     | Pejabat Struktural                   | 13                   | 6                    |
| 2.     | Jabatan Fungsional Umum/<br>Tertentu | 28                   | 31                   |
| JUMLAH |                                      | 41                   | 37                   |

*Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang*

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Disdikbud Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana pada Disdikbud Kabupaten Magelang

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                          | 3      | 4      |
| 1  | Bangunan Kantor            | 2      | Gedung |
| 2  | Kendaraan Bermotor Roda 4  | 7      | Unit   |
| 3  | Kendaraan Bermotor Roda 2  | 92     | Unit   |
| 4  | Meja                       | 347    | Unit   |
| 5  | Kursi / Kursi Sice         | 676    | Unit   |
| 6  | <i>Filling Cabinet</i>     | 18     | Unit   |
| 7  | Lemari / Lemari Arsip      | 67     | Unit   |
| 8  | Rak Arsip                  | 56     | Unit   |
| 9  | Brankas                    | 2      | Unit   |
| 10 | Komputer                   | 55     | Unit   |
| 11 | Pemadam Kebakaran          | 12     | Unit   |
| 12 | Televisi                   | 10     | Unit   |
| 13 | Mesin Tik                  | 3      | Unit   |
| 14 | Trolley Dorong             | 2      | Unit   |
| 15 | Telepon/ fax               | 2      | Unit   |
| 16 | Dispenser                  | 12     | Unit   |
| 17 | Cermin besar               | 2      | Buah   |
| 18 | Jam Dinding                | 10     | Buah   |
| 19 | Kipas Angin                | 12     | Unit   |
| 20 | Vacum Cleaner              | 4      | Buah   |
| 21 | Laptop                     | 57     | Unit   |

|    |                         |    |      |
|----|-------------------------|----|------|
| 22 | Mesin Hitung/Kalkulator | 5  | Unit |
| 23 | Scanner                 | 4  | Unit |
| 24 | Mesin Potong Rumput     | 1  | Unit |
| 25 | Sound System Portable   | 6  | Unit |
| 26 | LCD Proyektor           | 14 | Unit |
| 27 | Papan White Board       |    | Buah |
| 28 | Printer/Printonix       | 62 | Unit |
| 29 | UPS                     | 3  | Unit |
| 30 | Wireless                | 6  | Unit |
| 31 | Kamera digital          | 2  | Unit |
| 32 | Video Camera            | 1  | Unit |
| 33 | Kulkas                  | 4  | Unit |
| 34 | AC                      | 30 | Unit |
| 35 | Megaphone               | 2  | Unit |
| 36 | AC Portable             | 5  | Unit |
| 37 | Speaker Internal        | 30 | Unit |
| 38 | Papan Pengumuman        | 7  | Unit |
| 39 | Amplifier               | 6  | Unit |
| 40 | CCTV                    | 10 | Unit |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

#### a. Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37  
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2018

| Indikator               | Tahun |       |        |        |        |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                         | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   |
| Angka Partisipasi Kasar | 52,66 | 55,57 | 60,27  | 62,64  | 64,79  |
| Angka Partisipasi Kasar | 99,87 | 99,87 | 103,69 | 105,87 | 106,76 |
| Angka Partisipasi Kasar | 83,52 | 84,49 | 82,40  | 88,38  | 91,67  |
| Angka Partisipasi       | 78,68 | 79,98 | 82,12  | 85,63  | 87,74  |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2019

APK jenjang SD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100

menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%.

Tabel 2.38  
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2018

| Indikator                               | Tahun |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A   | 87,02 | 86,74 | 89,70 | 92,66 | 94,78 |
| Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B | 62,40 | 64,86 | 62,78 | 67,76 | 71,48 |
| Angka Partisipasi Murni                 | 74,71 | 75,8  | 76,24 | 80,21 | 88,18 |

*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2019*

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai angka 100%, bahkan untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di kabupaten Magelang belum optimal.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS pada kelompok umur 7-12 tahun selama tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif, namun apabila dibandingkan tahun 2014 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,25. APS pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, namun masih tetap harus ditingkatkan karena belum mencapai kondisi ideal 100%.

Tabel 2.39  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang  
Pendidikan Dasar  
Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun |       |       |       |       |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                    | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| 1  | SD/MI (7-12 th)    | 99,56 | 99,74 | 98,18 | 98,94 | 99,81 |
| 2  | SMP/MTs (13-15 th) | 93,24 | 94,08 | 95,65 | 96,45 | 96,78 |

*Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2019*

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun lebih rendah, namun untuk kelompok usia 13-15 tahun lebih tinggi. Berarti untuk kelompok usia 13-15, akses dari penduduk usia sekolah dalam menikmati pendidikan formal di sekolah masyarakat Kabupaten Magelang masih rendah dibanding provinsi dan nasional.

Tabel 2.40  
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia  
Tahun 2014-2018

| No | Tahun | 7-12 TAHUN |       |       | 13-15 TAHUN |        |       |
|----|-------|------------|-------|-------|-------------|--------|-------|
|    |       | Kab        | Prov  | Nas   | Kab         | Prov   | Nas   |
| 1  | 2014  | 99,56      | 99,51 |       | 93,24       | 94.85  |       |
| 2  | 2015  | 99,74      | 99,56 | 99,09 | 94,08       | 95.30  | 94,72 |
| 3  | 2016  | 98,18      | 99,58 | 99,09 | 95,65       | 95.41  | 94,88 |
| 4  | 2017  | 98,94      | 99,62 | 99,14 | 96,45       | 95,48  | 95,08 |
| 5  | 2018  | 99,81      | 99.76 | N/A   | 96,78       | 95.483 | N/A   |

*Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2019*

c. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2017 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

| Indikator                       | Tahun |        |        |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|
|                                 | 2014  | 2015   | 2016   | 2017  | 2018   |
| Angka Kelulusan SD/MI/Paket A   | 99,98 | 99,98  | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B | 99,49 | 100,00 | 99,98  | 99,77 | 99,91  |

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Artinya proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mencetak murid yang sesuai kemampuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dilakukan guru telah berhasil.

d. Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai Ujian Nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Data rerata nilai Ujian Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7  
Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

| Indikator                       | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rerata Nilai UN SD/MI/Paket A   | 7,77  | 7,25 | 7,03 | 7,59 | 7,42 |
| Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B | 5,81  | 6,19 | 5,86 | 5,78 | 5,79 |
| Rerata Nilai UN                 | 6,79  | 6,72 | 6,45 | 6,69 | 6,61 |

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Trend untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan.

e. Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan penilaian sekolah/madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai  $85 < \text{nilai} \leq 100$ ; B (Baik) dengan

nilai  $70 < \text{nilai} \leq 85$  dan C (Cukup) dengan nilai  $56 \leq \text{nilai} \leq 70$ . Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.8

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

| No | Indikator                               | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |        | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| 1  | Persentase SD berakreditasi minimal B.  | Persen | 98,01 | 98,51 | 98,18 | 98,68 | 99,34 |
| 2  | Persentase SMP berakreditasi minimal B. | Persen | 90,98 | 89,60 | 88,19 | 86,82 | 88,37 |

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 98,01%, naik menjadi 99,34% pada tahun 2018. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 90,98% pada tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 88,37% pada tahun 2018. Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

f. Kompetensi Pendidik

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

| No         | Indikator Kinerja                | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                                  |        | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| <b>1</b> . | Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV |        |       |       |       |       |       |
|            | 1.1 Guru SD/MI                   | %      | 64,44 | 74,69 | 79,66 | 83,75 | 86,10 |
|            | 1.2 Guru SMP/MTs                 | %      | 85,22 | 87,92 | 87,97 | 90,48 | 96,77 |
| <b>2</b> . | Guru bersertifikasi              |        |       |       |       |       |       |
|            | 2.1. Guru SD/MI                  | %      | 74,86 | 81,61 | 82,00 | 84,21 | 86,27 |
|            | 2.2. Guru SMP/MTs                | %      | 92,82 | 90,78 | 91,00 | 93,36 | 93,21 |

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2018

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2014 sebesar 74,86%, tahun 2015 sebanyak 81,61%, tahun 2016 sebanyak 82,00% dan tahun 2017 sebanyak 84,21% dan tahun 2018 sebesar 86,27%. Terlihat bahwa jumlah guru

SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan trend yang naik. Tahun 2018 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 86,10% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 13,90%. Selain itu, pada tahun 2017 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan.

Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017, namun pada tahun 2018 persentase guru yang bersertifikasi mengalami penurunan karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2014 sebesar % 74,86% naik menjadi 86,27% pada tahun 2018. Presentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2014 sebesar 92,82% dan naik menjadi 93,21% pada tahun 2018. Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan trend naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu .

- g. Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 ke 2018. Jumlah sarana penyelenggaraan seni di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) statis sejumlah 25. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 695 buah meningkat menjadi 949 buah di tahun 2018.

Tabel 2.44  
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2018

| No  | Uraian   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--|-------|------|------|------|------|
|     |  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 . | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | 54    | 44   | 81   | 38   | 126  |
| 2 . | Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni                      | 25    | 25   | 25   | 25   | 25   |
| 3 . | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi | N/A   | 698  | 698  | 922  | 949  |
| 4 . | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan    | N/A   | N/A  | 10   | 10   | 10   |

*Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019*

Selain itu perkembangan kelompok budaya yang terlayani dan juga kelompok budaya yang aktif dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45  
Perkembangan Kelompok Budaya Terlayani dan Kelompok Budaya Aktif

| Uraian   | TAHUN       |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
| <b>Jmlh Kelompok Budaya Terlayani</b>          | <b>90</b>   | <b>93</b>   | <b>164</b>  | <b>161</b>  |
| Kelompok kesenian                              | 68          | 68          | 138         | 152         |
| Kelompok Tradisi                               | 11          | 14          | 15          | 0           |
| Kelompok Penghayat                             | 11          | 11          | 11          | 9           |
| <b>Jmlh Kelompok Budaya yang Aktif</b>         | <b>2927</b> | <b>3204</b> | <b>3753</b> | <b>3881</b> |
| Kelompok kesenian                              | 1116        | 1293        | 1724        | 1851        |
| Kelompok Tradisi                               | 1800        | 1900        | 2018        | 2021        |
| Kelompok Penghayat                             | 11          | 11          | 11          | 9           |
| <b>Jumlah Kelompok Budaya Terinventarisasi</b> | <b>3409</b> | <b>3759</b> | <b>4493</b> | <b>4677</b> |
| Kelompok kesenian                              | 1598        | 1848        | 2464        | 2645        |
| Kelompok Tradisi                               | 1800        | 1900        | 2018        | 2021        |
| Kelompok Penghayat                             | 11          | 11          | 11          | 11          |

*Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019*

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.10 berikut ini :

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2018**

| No | Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target | Target | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |        |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |
|----|--|--------|--------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  | NSPK   | IKK    |                          | 2014                      | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014                        | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2014                         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
| -1 | -2   | -3     | -4     | -5                       | -6                        | -7     | -8     | -9     | -10    | -11                         | -12   | -13    | -14    | -15    | -16                          | -17    | -18    | -19    | -20    |
| 1  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                |        |        |                          | 94.59                     | 95.49  | 95.89  | 96.09  | 96.79  | 87.02                       | 86.74 | 89.7   | 92.66  | 94.78  | 92.00                        | 90.84  | 93.54  | 96.43  | 97.92  |
| 2  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B              |        |        |                          | 77.8                      | 78.9   | 79.95  | 80.85  | 81.96  | 62.40                       | 64.86 | 62.78  | 67.76  | 71.48  | 80.21                        | 82.21  | 78.52  | 83.81  | 87.21  |
| 3  | Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A                      |        |        |                          | 102.54                    | 102.34 | 102.14 | 101.04 | 101.94 | 101.33                      | 99.87 | 103.69 | 105.87 | 106.76 | 98.82                        | 97.59  | 101.52 | 104.78 | 104.73 |
| 4  | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B                    |        |        |                          | 95.06                     | 95.56  | 96.06  | 96.56  | 97.06  | 83.52                       | 85.92 | 82.4   | 88.38  | 91.67  | 87.86                        | 89.91  | 85.78  | 91.53  | 94.45  |
| 5  | Angka Putus Sekolah SD/MI                                  |        |        |                          | 0.16                      | 0.16   | 0.16   | 0.15   | 0.14   | 0.1                         | 0.1   | 0.19   | 0.05   | 0.07   | 62.50                        | 62.50  | 118.75 | 33.33  | 50.00  |
| 6  | Angka Putus Sekolah SMP/MTs                                |        |        |                          | 0.67                      | 0.65   | 0.63   | 0.61   | 0.59   | 0.31                        | 0.31  | 0.35   | 0.24   | 0.26   | 46.27                        | 47.69  | 55.56  | 39.34  | 44.07  |
| 7  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                 |        |        |                          | 99.64                     | 99.73  | 99.82  | 99.91  | 99.98  | 99.98                       | 99.98 | 100    | 99.99  | 100    | 100.34                       | 100.25 | 100.18 | 100.08 | 100.02 |
| 8  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                               |        |        |                          | 99.84                     | 99.88  | 99.92  | 99.96  | 99.99  | 100                         | 100   | 99.98  | 99.77  | 99.91  | 100.16                       | 100.12 | 100.06 | 99.81  | 99.92  |
| 9  | Rerata Nilai UN SD/MI                                      |        |        |                          | 7.64                      | 7.66   | 7.68   | 7.7    | 7.72   | 7.77                        | 7.25  | 7.03   | 7.59   | 7.42   | 101.70                       | 94.65  | 91.54  | 98.57  | 96.11  |
| 10 | Rerata Nilai UN SMP/MTs                                    |        |        |                          | 6.4                       | 6.42   | 6.44   | 6.46   | 6.48   | 5.81                        | 6.19  | 5.86   | 5.78   | 5.79   | 90.78                        | 96.42  | 90.99  | 89.47  | 89.35  |

| No | Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target | Target | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |        |        |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |
|----|--|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  | NSPK   | IKK    |                          | 2014                      | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014                        | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2014                         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
| -1 | -2   | -3     | -4     | -5                       | -6                        | -7    | -8    | -9    | -10   | -11                         | -12    | -13    | -14    | -15   | -16                          | -17    | -18    | -19    | -20    |
| 11 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)                 |        |        |                          | 82                        | 83    | 84    | 85    | 86    | 75.83                       | 81.305 | 83.815 | 87.115 | 91.49 | 92.48                        | 97.96  | 99.78  | 102.49 | 106.38 |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs                    |        |        |                          | 88.82                     | 89.02 | 89.22 | 89.42 | 89.62 | 89.7                        | 90.08  | 90.57  | 91.78  | 91.3  | 100.99                       | 101.19 | 101.51 | 102.64 | 101.87 |
| 13 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA               |        |        |                          | 67.41                     | 68.22 | 69.04 | 69.87 | 70.7  | 71.86                       | 75.3   | 76.33  | 79.18  | 79.18 | 106.60                       | 110.38 | 110.56 | 113.32 | 111.99 |
| 14 | Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI               |        |        |                          | 76.42                     | 78.48 | 80.55 | 82.61 | 84.68 | 59.97                       | 75.52  | 82     | 85.58  | 73.2  | 78.47                        | 96.23  | 101.80 | 103.60 | 86.44  |
| 15 | Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs                  |        |        |                          | 84.29                     | 85.72 | 87.14 | 88.57 | 90    | 67.97                       | 81.8   | 81.8   | 90.7   | 78.28 | 80.64                        | 95.43  | 93.87  | 102.40 | 86.98  |
| 16 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                   |        |        |                          |                           |       |       | 38    | 38    |                             |        |        | 38     | 126   |                              |        |        | 100.00 | 331.58 |
| 17 | Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya                     |        |        |                          |                           |       |       | 18    | 18    |                             |        |        | 25     | 25    |                              |        |        | 138.89 | 138.89 |
| 18 | Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan  |        |        |                          |                           |       |       | 66.85 | 66.95 |                             |        |        | 100    | 100   |                              |        |        | 149.59 | 149.37 |

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode Tahun 2014-2018 juga dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Gambaran tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014-2016 dapat diikuti pada Tabel 2.11 berikut ini:

TABEL 2.11  
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

| Uraian   | Anggaran pada Tahun ke |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |       |       | Rata-rata Pertumbuhan 2016-2018 |           |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--|-------|-------|---------------------------------|-----------|
|  | 2016                   | 2017          | 2018          | 2016                             | 2017          | 2018          | 2016   | 2017  | 2018  | Anggaran                        | Realisasi |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5                                | 6             | 7             | 8  | 9     | 10    | 11                              | 12        |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                           |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| Pendapatan Asli Daerah                             |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| Dana Perimbangan                                   |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah               |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
|  |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                              |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| <b>Belanja tidak langsung</b>                      |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| - Belanja Pegawai                                  |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
|  |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| <b>Belanja langsung</b>                            |                        |               |               |                                  |               |               |  |       |       |                                 |           |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         | 938.000.000            | 1.190.000.000 | 1.101.800.000 | 841.340.721                      | 992.402.773   | 1.027.656.273 | 89,70  | 98,17 | 90,64 |                                 |           |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 2.330.412.450          | 4.038.141.600 | 1.587.220.910 | 1.986.188.924                    | 3.533.029.197 | 1.064.410.681 | 85,23  | 87,49 | 67,06 |                                 |           |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 525.000.000            | -             | 366.460.000   | 516.799.860                      | -             | 366.459.975   | 98,44  | -     | 100   |                                 |           |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan  | 32.000.000             | 25.000.000    | 25.000.000    | 30.631.850                       | 24.499.350    | 24.999.600    | 95,72  | 98,00 | 100   |                                 |           |

|   |                |                 |                 |                |                |                     |       |       |       |  |  |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|
| capaian kinerja dan keuangan                                    |                |                 |                 |                |                |                     |       |       |       |  |  |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini                               | 747.400.000    | 728.200.335     | -               | 740.685.866    | 685.271.645    | -                   | 99,10 | 94,10 | -     |  |  |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun           | 79.850.020.689 | 197.466.972.597 | 137.987.468.074 | 14.402.377.400 | 185.144.642.55 | 125.466.107.086..21 | 18,04 | 93,76 | 90,93 |  |  |
| Program Pendidikan Non Formal                                   | 683.379.450.   | 1.970.845.000   | 1.684.000.000   | 630.189.290    | 1.720.913.190  | 1.594.440.600       | 92,22 | 87,32 | 94,68 |  |  |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan       | 2.875.500.000  | 4.253.586.700   | 1.862.760.000   | 2.870.459.450  | 4.094.341.470  | 1.838.201.150       | 99,82 | 96,26 | 98,68 |  |  |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                          | 17.598.899.962 | 22.483.168.380  | 31.096.400.250  | 17.028.613.163 | 21.680.877.876 | 30.583.867.105      | 96,76 | 96,43 | 98,35 |  |  |
| Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  | 150.000.000    | 250.000.000     | -               | 122.830.000    | 244.509.750    | -                   | 81,89 | 97,80 | -     |  |  |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 50.000.000     | 50.000.000      | 74.800.000      | 38.514.600     | 49.881.000     | 54.867.000          | 77,03 | 99,76 | 73,35 |  |  |
| Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda            | 238.000.000    | 150.000.000     | 90.000.000      | 201.689.850    | 130.227.310    | 89.296.500          | 84,74 | 86,82 | 99,22 |  |  |
| Program Pengembangan Nilai Budaya                               | -              | 2.294.147.000   | 1.421.838.000   | -              | 2.160.215.895  | 1.352.109.030       | -     | 96,16 | 95,10 |  |  |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                             | -              | 288.883.000     | 330.473.000     | -              | 268.698.020    | 325.633.960         | -     | 93,01 | 98,54 |  |  |

|  |             |               |               |             |               |               |       |       |       |  |  |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya                             | -           | 1.160.652.000 | 1.031.719.000 | -           | 1.151.089.260 | 1.011.322.755 | -     | 99,18 | 98,02 |  |  |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah                           | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -     | -     | -     |  |  |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 525.000.000 | 2.014.600.000 | 1.396.600.000 | 504.679.800 | 1.709.446.500 | 1.360.421.850 | 96,13 | 84,85 | 97,41 |  |  |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparat                        | 21.000.000  | 175.000.000   | 175.000.000   | 20.979.920  | 173.939.880   | 174.598.725   | 99,90 | 99,39 | 99,77 |  |  |

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Adapun sasaran global dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- 2) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
- 3) Pada Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
- 4) Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
- 5) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan melalui :

1. Pelindungan yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi
2. Pengembangan yaitu upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
3. Pemanfaatan yaitu upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.dan
4. Pembinaan yaitu upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Memajukan kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter.

Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Adapun agenda strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan adalah :

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi Budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di Dunia Internasional;
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.

Adapun peluang yang dapat menjadi keuntungan dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

1. Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
2. Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;
3. Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Tantangan dan peluang pengembangan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang menjadi pedoman penentuan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam lima tahun kedepan

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Pembangunan pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sebagai salah satu faktor pembentuk IPM, keberhasilan pembangunan pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan Pembanguna manusia.

Kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 12,48, Provinsi Jawa Tengah : 12,63 dan nasional : 12,91), Rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 7,41, Provinsi Jawa Tengah 7,27 dan nasional 8,1) dan pencapaian nilai akreditasi sekolah PAUD, SD dan SMP yang berakreditasi minimal B belum mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang, adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
2. Belum optimalnya mutu pendidikan, ditandai dengan nilai Ujian Nasional dan mutu guru. Terkait mutu guru, dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SD/MI: 83,75% dan pada jenjang SMP/MTs: 90,48%. Sementara itu guru bersertifikasi pada jenjang SD/MI: 51,49% dan pada jenjang SMP/MTs: 56,31%

Permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih rendahnya jumlah Benda situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan, kelompok budaya yang terlayani serta belum maksimalnya kelompok budaya yang aktif .

Pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu

maupun makhluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan dan kebudayaan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantan gan masa depan. Permasalahan bidang pendidikan dan Kebudayaan sangat dinamis meliputi akses, mutu, pelestarian dan pengembangan budaya yang membutuhkan langkah strategis, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir permasalahan dimaksud. Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

| MASALAH POKOK  | MASALAH   | AKAR MASALAH   |
|--|---|--|
| Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan | partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan relatif rendah                | Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi  |
|  | belum optimalnya keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar | Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi   |
|  |   | Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi  |
|  |   | Adanya Dampak negatife revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang   |
|  |   | keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuuhan khusus, sakit, Iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak |
| Belum optimalnya mutu pendidikan                                   | Belum optimalnya mutu pendidikan  | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan   |
|  |   | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 %                     |
|  |   | Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM   |
|  |   | Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik  |
|  |   | Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)   |
| Blm Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan         | Belum Optimalnya perlindungan dan pengembangan Kebudayaan                       | Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya  |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Pemanfaatan) Kebudayaan |  |   |
|                         |  | Banyaknya karya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian |
|                         |  | Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya              |

### 3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia,
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup,
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dari ketiga Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mempunyai tugas untuk membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Adapun fungsi dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

| Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati   | Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                      | Faktor  |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | Pendorong   | Penghambat  |
| -2   | -3   | -4   | -5  | -6  |
| Misi : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia                                   | Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan  |  |   |   |
| Program: Pendidikan  |  |  |   |   |
| Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin  | Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.   | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan           | Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi   |
| Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/ TK. | Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.<br><br>Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.<br><br>Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.<br><br>Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan | Belum optimalnya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah | Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;<br><br>Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi<br>Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain (fasilitasi ke Prov oleh Bappeda); | Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi<br><br>Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi<br><br>Adanya Dampak negative revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang<br><br>keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuuhan |

|  |   |                                  |  |   |
|--|---|----------------------------------|--|---|
|  | Kebudayaan.   |                                  |  | khusus, sakit, Iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak   |
| Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan                                   | Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.<br>Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan. | Belum optimalnya mutu pendidikan |  | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan  |
| Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut. | Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.  |                                  |  | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 % Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik |
|  | Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan   |                                  |  | Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)  |
|  | Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.   |                                  |  |   |
|  | Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.  |                                  |  |   |
|  | Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.   |                                  |  |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.  | Blm Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan |  | Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya<br><br>Banyaknya karya budaya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian<br>Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya<br>SMA/K menjadi kewenangan Provinsi |
| Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.                                 | Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.  |  |  |  |
| Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<br>Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.<br><br>Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan. |  |  |  |

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

| No. | Sasaran Renstra K/L   | Sasaran Renstra PD Provinsi   | Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                      | Faktor   |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|
|     |   |   |   |  | Pendorong  | Penghambat   |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat   | Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja | Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan           | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan           | Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi  |
|     | Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan   | Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai nilai budaya.   | Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.                                | Belum optimalnya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah | Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;   | Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi   |
|     | Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa                                     | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah  | Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.                          | Belum optimalnya mutu pendidikan   | Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;  | Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi  |
|     | Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah   | Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.  | Kurang optimalnya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan                     | Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi   | Adanya Dampak negative revolusi digital yg berpotensi besar di akses pelajar Kabupaten Magelang  |
|     | -   |   | Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan                                     |  |  | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan   |
|     |   |   | Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.  |  |  | keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial  |
|     |   |   | Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.  |  |  | Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi   |
|     |   |   | Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.   |  |  | belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 % |
|     |   |   | Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.   |  |  | Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM   |
|     |   |   | Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.   |  |  | Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik  |
|     |   |   | Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.  |  |  | Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)   |
|     |   |   | Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.                       |  |  | Banyaknya karya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang hampir punah   |
|     |   |   | Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.   |  |  | Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya   |
|     |   |   | Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.     |  |  | Banyaknya kesenian khas kabupaten Magelang yang perlu dilestarikan   |
|     |   |   | Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.                       |  |  |  |
|     |   |   | Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.  |  |  |  |
|     |   |   | Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. |  |  |  |
|     |   |   | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.                         |  |  |  |

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Magelang mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru. Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan. Penataan Cagar budaya di Kabupaten Magelang juga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada khususnya.

#### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan yang memerlukan penanganan adalah:

- 1) partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
- 2) mutu pendidikan;
- 3) pengelolaan kebudayaan.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan
- 2) Belum optimalnya mutu pendidikan
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang serta tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Magelang lima tahun kedepan khususnya urusan pendidikan dan kebudayaan. Tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan dengan tetap memperhatikan isu strategis, pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah : Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan.

Adapun sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
2. Meningkatnya mutu pendidikan.
3. Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

Adapun hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Tujuan Dan Sasaran

| NO | TUJUAN   | SASARAN | Indikator Kinerja Utama                            | Rumusan Indikator   | Satuan           | Kondisi Awal Kinerja |       | Target Capaian |       |       |       |       | Kondisi Akhir Kinerja |
|----|--|---------|--|---|------------------|----------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|    |  |         |  |   |                  | 2018                 | 2019  | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                       |
| 1  | 2  | 3       | 4  | 5   | 6                | 7                    | 8     | 9              | 10    | 11    | 12    | 13    | 14                    |
| 1  | Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan                    |         | Rata-rata Lama Sekolah                             | Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.  | tahun            | 7,57                 | 7,72  | 7,86           | 8,00  | 8,14  | 8,27  | 8,41  | 8,41                  |
| 2  |  |         | Harapan Lama Sekolah                               | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.  | tahun            | 12,48                | 12,67 | 12,76          | 12,92 | 13,02 | 13,17 | 13,27 | 13,27                 |
| 3  |  |         | Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B | $((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) * 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) * 100\%) / 2$ | persen           | 93,86                | 93,89 | 94,41          | 94,79 | 95,19 | 95,56 | 95,94 | 95,94                 |
| 4  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan |         | Angka Partisipasi Kasar (APK)                      | $(\text{APK PAUD} + \text{APK SD/MI/Paket A} + \text{APK SMP/MTS/Paket B}) / 3$   | angka<br>(0-100) | 87,74                | 87,92 | 89,02          | 90,12 | 91,22 | 92,31 | 93,41 | 93,41                 |
| 5  |  |         | Angka Partisipasi Murni (APM)                      | $(\text{APM SD/MI/Paket A} + \text{APM SMP/MTS/Paket B}) / 2$   | angka<br>(0-100) | 83,13                | 83,82 | 84,50          | 85,19 | 85,87 | 86,56 | 87,24 | 87,24                 |

|   |  |  |                                   |   |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 |  |  | Angka Partisipasi Sekolah (APS)** | (APS PAUD + APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/3  | angka<br><br>(0-100) | 94,78 | 95,42 | 95,96 | 96,40 | 97,03 | 97,65 | 98,28 | 98,28 |
| 7 |  | Meningkatnya Mutu Pendidikan   | Rerata Nilai UN                   | (Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2  | angka<br><br>(0-10)  | 6,61  | 6,64  | 6,67  | 6,71  | 6,74  | 6,77  | 6,81  | 6,81  |
| 8 |  |  | Angka Kelulusan                   | (Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2  | angka<br><br>(0-100) | 99,88 | 99,90 | 99,92 | 99,94 | 99,96 | 99,98 | 100   | 100   |
| 9 |  | Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan | Cakupan pengelolaan kebudayaan    | ((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3 | persen               | 31,44 | 32,26 | 32,86 | 33,31 | 33,69 | 34,16 | 34,6  | 34,6  |

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun setiap tahun selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan , Sasaran, Strategi , dan Kebijakan**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Visi :</b>   | <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH)</b> |   |   |
| <b>Misi I :</b>   | <b>Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>                      |   |   |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan  | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan              | Mewujudkan wajib belajar 9 tahun  |
|   |   | Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar | Regulasi terkait usia anak sekolah per jenjang  |
|   |   |   | Beasiswa siswa miskin, Bosda dan sekolah inklusi  |
|   |   |   | Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan   |
|   | Meningkatnya Mutu Pendidikan  | Meningkatkan Mutu Pendidikan  | Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap dengan mengacu SNP   |
|   |  |   | Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  |
|   |  |   | Meningkatkan kompetensi dan karier tenaga pendidik dan kependidikan  |
|   |  |   | Meningkatkan rasio siswa per sekolah di SD yang siswanya > 120   |
| Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan | Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan | Meningkatkan perlindungan dan pengembangan Kebudayaan | Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya                                  |
|   |  |   | Meningkatkan pelayanan dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung |
|   |  |   | Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan karya budaya  |
|   |  |   | Melestarikan kesenian-kesenian khas  |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Pendidikan Sekolah Dasar
4. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan

Adapun klasifikasi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja SKPD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Pendidikan menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

| No  | Perangkat Daerah              | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Formula  | Satuan        | Kondisi Awal Kinerja |       | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|-------------------------------|--|--|---------------|----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|     |                               |  |  |               | 2018                 | 2019  | 2020         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                       |
| (1) | (2)                           | (3)                                      | (4)  | (5)           | (6)                  | (7)   | (8)          | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)                  |
| 1   | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | Angka Partisipasi Kasar (APK)            | (APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3 | angka (0-100) | 87,74                | 87,92 | 89,02        | 90,12 | 91,22 | 92,31 | 93,41 | 93,41                 |
| 2   |                               | Angka Partisipasi Murni (APM)            | (APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTS/Paket B)/2            | angka (0-100) | 83,13                | 83,82 | 84,50        | 85,19 | 85,87 | 86,56 | 87,24 | 87,24                 |
| 3   |                               | Angka Partisipasi Sekolah (APS)          | (APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/2            | angka (0-100) | 94,78                | 95,42 | 95,96        | 96,40 | 97,03 | 97,65 | 98,28 | 98,28                 |
| 4   |                               | Rerata Nilai UN                          | (Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2           | angka (0-10)  | 6,61                 | 6,64  | 6,67         | 6,71  | 6,74  | 6,77  | 6,81  | 6,81                  |
| 5   |                               | Angka Kelulusan                          | (Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2             | angka (0-100) | 99,88                | 99,90 | 99,92        | 99,94 | 99,96 | 99,98 | 100   | 100                   |

|   |                                |   |        |       |       |       |       |       |       |      |      |
|---|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 6 | Cakupan pengelolaan kebudayaan | ((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3 | persen | 31,44 | 32,26 | 32,86 | 33,31 | 33,69 | 34,16 | 34,6 | 34,6 |
|---|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD

| INDIKATOR   | FORMULASI INDIKATOR  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD |       | Target Capaian Kinerja |       |       |        |        | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|---|--|----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------|
|   |  | 2018                       | 2019  | 2020                   | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |                                     |
| Angka putus Sekolah SD/MI                         | (Jumlah Anak Putus Sekolah SD dan MI se-Kabupaten / Jumlah Seluruh siswa SD dan MI se-Kabupaten)*100%                    | 0.07                       | 0.07  | 0.06                   | 0.06  | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.05                                |
| Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs                | (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya)*100% | 91.30                      | 91.85 | 91.95                  | 92    | 92.1  | 92.3   | 92.5   | 92.50                               |
| Persentase sekolah SD dengan siswa ideal          | (Jumlah SD dengan jumlah siswa ideal/jumlah SD)*100%   | 39.17                      | 39.50 | 40                     | 40.56 | 40.89 | 41.29  | 41.53  | 41.53                               |
| Persentase SD yang menerapkan pendidikan karakter | (Jumlah- SD yang menerapkan pendidikan karakter/jumlah SD)*100%  | NA                         | NA    | 25.04                  | 50.08 | 70.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00                              |

|   |  |       |       |       |       |       |       |        |        |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Persentase SD – dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | (Jumlah SD dengan sarpras sesuai standar/jumlah SD)*100%   | 71.31 | 72.14 | 73.13 | 73.96 | 74.96 | 75.79 | 76.62  | 76.62  |
| Angka putus Sekolah SMP/MTs   | (Jumlah Anak Putus Sekolah SMP dan MTs se-Kabupaten / Jumlah Seluruh siswa SMP dan MTs se-Kabupaten)*100%                | 0.26  | 0.25  | 0.24  | 0.23  | 0.22  | 0.22  | 0.21   | 0.21   |
| Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA   | (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA / Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya)*100% | NA    | 79.6  | 79.95 | 80.45 | 80.65 | 80.85 | 81     | 81.00  |
| persentase SMP yang menerapkan pendidikan karakter)                     | (Jumlah- SMP yang menerapkan pendidikan karakter/jumlah SMP)*100%  | NA    | NA    | 38.46 | 53.85 | 69.23 | 84.62 | 100.00 | 100.00 |
| Persentase sekolah SMP dengan jumlah siswa ideal                        | (Jumlah SMP dengan jumlah siswa ideal/jumlah SMP)*100%   | 34.38 | 35.16 | 35.94 | 36.72 | 37.50 | 38.28 | 39.06  | 39.06  |
| Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)  | (Jumlah SMP dengan sarpras sesuai standar Nasional Pendidikan/jumlah sarpras SMP)*100%                                   | 65.89 | 70.54 | 72.87 | 74.42 | 76.74 | 79.07 | 80.62  | 80.62  |
| Persentase PNF terakreditasi (LKP,PKBM))                                | (Jumlah PNF terakreditasi /jumlah PNF)*100%  | 47.83 | 54.35 | 60.87 | 67.39 | 73.91 | 82.61 | 89.13  | 89.13  |
| Persentase PAUD terakreditasi (TK,KB, SPS)                              | (Jumlah PAUD terakreditasi /jumlah PAUD)*100%  | 29.33 | 37.75 | 48.99 | 60.22 | 71.46 | 82.70 | 93.93  | 93.93  |

|  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase guru bersertifikat                                      | (Jumlah guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat /jumlah guru PAUD,SD,SMP)*100%   | 89.70 | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | 95.00 |
| Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru                     | (Jumlah guru yang lulus Uji Kompetensi Guru/jumlah Guru)*100%  | NA    | 64.38 | 65.40 | 67.45 | 68.48 | 69.56 | 70.53 | 70.53 |
| Persentase Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | (Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/ Jumlahl benda, situs dan kawasan yang terinventarisir)*100% | 7.90  | 9.48  | 10.54 | 11.59 | 12.64 | 13.70 | 14.75 | 14.75 |
| Persentase Karya Budaya yang terlayani                             | Jmlh Kelompok Budaya terlayani/Jumlah KelompokBudaya terinventarisai   | 3.44  | 3.96  | 4.12  | 4.20  | 4.30  | 4.44  | 4.51  | 4.51  |
| Persentase Kelompok seni budaya yg aktif                           | Jmlh Kelompok Seni Budaya terinventarisasi yg aktif / Jumlah Kelompok Seni Budaya yg terinventarisasi                        | 82.98 | 83.33 | 83.92 | 84.13 | 84.14 | 84.34 | 84.54 | 84.54 |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen rencana strategis disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran dan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya renstra BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran ( RKA Perubahan).
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Disdikbud ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disdikbud diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA Disdikbud.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dalam renstra diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Disdikbud.

Demi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019



Plt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
Kesejahteraan Administrasi Umum

**Drs. CHANDRA ENDAH WACANA, M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630908 198903 1 008

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

| Tujuan                                      | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                     | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                    |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|---|---------|-----------------|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
|   |         |                 |   |  | 2018                                     | 2019                | 2020                                  |                 | 2021                |                 | 2022                |                 | 2023                |                 | 2024               |                 | Target  | Rp.               |  |                                 |
|   |         |                 |   |  | Target                                   | Target              | Target                                | Rp.             | Target              | Rp.             | Target              | Rp.             | Target              | Rp.             | Target             | Rp.             | Target  | Rp.               |  |                                 |
| Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan |         |                 |   | Rata-rata Lama Sekolah   | 7,57 tahun                               | 7,72 tahun          | 7,86 tahun                            | 199.197.375.000 | 8,00 tahun          | 200.178.375.000 | 8,14 tahun          | 199.626.875.000 | 8,27 tahun          | 200.900.375.000 | 8,41 tahun         | 200.958.375.000 | 8,41 tahun                                      | 1.000.861.375.000 |  |                                 |
|   |         |                 |   | Harapan Lama Sekolah   | 12,48 tahun                              | 12,67 tahun         | 12,76 tahun                           |                 | 12,92 tahun         |                 | 13,02 tahun         |                 | 13,17 tahun         |                 | 13,27 tahun        |                 | 13,27 tahun                                     |                   |  |                                 |
|   |         |                 |   | Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B                         | 93,86 persen                             | 93,89 persen        | 94,41 persen                          |                 | 94,79 persen        |                 | 95,19 persen        |                 | 95,56 persen        |                 | 95,94 persen       |                 | 95,94 persen                                    |                   |  |                                 |
| Meningkatnya mutu pendidikan                |         |                 |   | Rerata Nilai UN  | 6,61 angka (0-10)                        | 6,64 angka (0-10)   | 6,67 angka (0-10)                     | 46.727.972.000  | 6,71 angka (0-10)   | 46.727.972.000  | 6,74 angka (0-10)   | 46.737.972.000  | 6,77 angka (0-10)   | 46.737.972.000  | 6,81 angka (0-10)  | 46.757.972.000  | 6,81 angka (0-10)                               | 233.689.860.000   |  |                                 |
|   |         |                 |   | Angka Kelulusan  | 99,88 angka (0-100)                      | 99,90 angka (0-100) | 99,92 angka (0-100)                   |                 | 99,94 angka (0-100) |                 | 99,96 angka (0-100) |                 | 99,98 angka (0-100) |                 | 100 angka (0-100)  |                 | 100 angka (0-100)                               |                   |  |                                 |
|   |         | 1.1.1.1.1.1.7   | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah    | 0 %                                      | 0 %                 | 100 %                                 | 6.975.000.000   | 100 %               | 6.975.000.000   | 100 %               | 6.985.000.000   | 100 %               | 6.985.000.000   | 100 %              | 7.005.000.000   | 100 %   | 34.925.000.000    |  |                                 |
|   |         | 1.1.1.1.1.1.7.1 | Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka   | 1. Jumlah Surat yang dikelola  | 0 surat                                  | 0 surat             | 100000 surat                          | 340.000.000     | 100000 surat        | 340.000.000     | 100000 surat        | 350.000.000     | 100000 surat        | 350.000.000     | 100000 surat       | 370.000.000     | 100000 surat                                    | 1.750.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   |         |                 |   | 2. Jumlah Kecamatan yang terlayani   | 0 Kecamatan                              | 0 Kecamatan         | 21 Kecamatan                          |                 | 21 Kecamatan        |                 | 21 Kecamatan        |                 | 21 Kecamatan        |                 | 21 Kecamatan       |                 | 21 Kecamatan                                    |                   |  |                                 |
|   |         | 1.1.1.1.1.1.7.2 | Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah  | 1. Jumlah rapat koordinasi luar daerah                                     | 0 kali                                   | 0 kali              | 300 kali                              | 1.405.000.000   | 300 kali            | 1.405.000.000   | 300 kali            | 1.405.000.000   | 300 kali            | 1.405.000.000   | 300 kali           | 1.405.000.000   | 300 kali  | 7.025.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   |         |                 |   | 2. Jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah                         | 0 orang                                  | 0 orang             | 101 orang                             |                 | 101 orang           |                 | 101 orang           |                 | 101 orang           |                 | 101 orang          |                 | 101 orang                                       |                   |  |                                 |
|   |         |                 |   | 3. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah                                    | 0 kali                                   | 0 kali              | 50 kali                               |                 | 50 kali             |                 | 50 kali             |                 | 50 kali             |                 | 50 kali            |                 | 50 kali   |                   |  |                                 |
|   |         |                 |   | 4. Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah                                    | 0 SPPD                                   | 0 SPPD              | 500 SPPD                              |                 | 500 SPPD            |                 | 500 SPPD            |                 | 500 SPPD            |                 | 500 SPPD           |                 | 500 SPPD  |                   |  |                                 |
|   |         |                 |   | 5. Jumlah kecamatan yang terlayani   | 0 kecamatan                              | 0 kecamatan         | 21 kecamatan                          |                 | 21 kecamatan        |                 | 21 kecamatan        |                 | 21 kecamatan        |                 | 21 kecamatan       |                 | 21 kecamatan                                    |                   |  |                                 |
|   |         |                 |   | 6. Jumlah laporan hibah bansos   | 0 dokumen                                | 0 dokumen           | 1 dokumen                             |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen          |                 | 1 dokumen                                       |                   |  |                                 |
|   |         | 1.1.1.1.1.1.7.3 | Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya | 1. jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan                           | 0 paket                                  | 0 paket             | 3 paket                               | 2.070.000.000   | 3 paket             | 2.070.000.000   | 3 paket             | 2.070.000.000   | 3 paket             | 2.070.000.000   | 3 paket            | 2.070.000.000   | 3 paket   | 10.350.000.000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   |         |                 |   | 2. Dokumen aset  | 1 dokumen                                | 1 dokumen           | 1 dokumen                             |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen           |                 | 1 dokumen          |                 | 1 dokumen                                       |                   |  |                                 |
|   |         | 1.1.1.1.1.1.7.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya                              | 1. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                    | 0 gedung kantor                          | 0 gedung kantor     | 22 gedung kantor                      | 1.100.000.000   | 22 gedung kantor    | 1.100.000.000   | 22 gedung kantor    | 1.100.000.000   | 22 gedung kantor    | 1.100.000.000   | 22 gedung kantor   | 1.100.000.000   | 22 gedung kantor                                | 5.500.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|   |         |                 |   | 2. Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar        | 0 rekening bulan                         | 0 rekening bulan    | 540 rekening bulan                    |                 | 540 rekening bulan  |                 | 540 rekening bulan  |                 | 540 rekening bulan  |                 | 540 rekening bulan |                 | 540 rekening bulan                              |                   |  |                                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode             | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                         | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|------------------|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|--|---------------------------------|
|        |         |                  |  |  | 2018                                     | 2019                    | 2020                                  |                | 2021                    |                | 2022                    |                | 2023                    |                | 2024                    |                | Target  | Rp.             |  |                                 |
|        |         |                  |  |  | Target                                   | Target                  | Target                                | Rp.            | Target                  | Rp.            | Target                  | Rp.            | Target                  | Rp.            | Target                  | Rp.            | Target  | Rp.             |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                | 4  | 5  | 6  | 7                       | 8                                     | 9              | 10                      | 11             | 12                      | 13             | 14                      | 15             | 16                      | 17             | 18  | 19              | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.7.5  | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya | 1. Jumlah perlengkapan yang dipelihara                                     | 0 komplek Gedung Kantor                  | 0 komplek Gedung Kantor | 1 komplek Gedung Kantor               | 1.410.000.000  | 1 komplek Gedung Kantor | 1.410.000.000  | 1 komplek Gedung Kantor | 1.410.000.000  | 1 komplek Gedung Kantor | 1.410.000.000  | 1 komplek Gedung Kantor | 1.410.000.000  | 1 komplek Gedung Kantor                         | 7.050.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                  |  | 2. Jumlah peralatan yang dipelihara  | 0 unit komputer/laptop                   | 0 unit komputer/laptop  | 40 unit komputer/laptop               |                | 40 unit komputer/laptop |                | 40 unit komputer/laptop |                | 40 unit komputer/laptop |                | 40 unit komputer/laptop |                | 40 unit komputer/laptop                         |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara                           | 0 unit                                   | 0 unit                  | 7 unit                                |                | 7 unit                  |                | 7 unit                  |                | 7 unit                  |                | 7 unit                  |                | 7 unit  |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 4. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara                           | 0 unit                                   | 0 unit                  | 125 unit                              |                | 125 unit                |                | 125 unit                |                | 125 unit                |                | 125 unit                |                | 125 unit  |                 |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.7.6  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya               | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                       | 0 paket                                  | 0 paket                 | 4 paket                               | 400.000.000    | 4 paket                 | 400.000.000    | 4 paket                 | 400.000.000    | 4 paket                 | 400.000.000    | 4 paket                 | 400.000.000    | 4 paket   | 2.000.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.7.7  | Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara   | 1. Jumlah ASN yang dibina  | 0 orang                                  | 0 orang                 | 150 orang                             | 250.000.000    | 150 orang               | 250.000.000    | 150 orang               | 250.000.000    | 150 orang               | 250.000.000    | 150 orang               | 250.000.000    | 150 orang                                       | 1.250.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                  |  | 2. Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan                          | 0 stel                                   | 0 stel                  | 0 stel                                |                | 0 stel                  |                | 0 stel                  |                | 0 stel                  |                | 0 stel                  |                | 0 stel  |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 3. volume rapat kerja dinas  | 0 kali                                   | 1 kali                  | 1 kali                                |                | 1 kali                  |                | 1 kali                  |                | 1 kali                  |                | 1 kali                  |                | 1 kali  |                 |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.7.9  | Pengadaan Tanah  | -  | -  | -                       | 0                                     | -              | 0                       | -              | 0                       | -              | 0                       | -              | 0                       | -              | 0   | -               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26   | Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan   | 1. Persentase Guru Bersertifikat   | 89,70 %                                  | 90,00 %                 | 91,00 %                               | 39.752.972.000 | 92,00 %                 | 39.752.972.000 | 93,00 %                 | 39.752.972.000 | 94,00 %                 | 39.752.972.000 | 95,00 %                 | 39.752.972.000 | 95,00 %   | 198.764.860.000 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 2. Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru                          | NA %                                     | 64,38 %                 | 65,40 %                               |                | 67,45 %                 |                | 68,48 %                 |                | 69,56 %                 |                | 70,53 %                 |                | 70,53 %   |                 |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26.1 | Pembinaan GTK  | 1. Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas                       | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 750 Orang                             | 400.000.000    | 750 Orang               | 400.000.000    | 750 Orang               | 400.000.000    | 750 Orang               | 400.000.000    | 750 Orang               | 400.000.000    | 750 Orang                                       | 2.000.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                  |  | 2. Jumlah laporan hasil kegiatan penataan guru                             | 0 dokumen                                | 0 dokumen               | 1 dokumen                             |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 3. Jumlah laporan penanganan kasus   | 0 dokumen                                | 0 dokumen               | 1 dokumen                             |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 4. Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian                       | 0 dokumen                                | 0 dokumen               | 1 dokumen                             |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen               |                | 1 dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26.2 | Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)                                      | Jumlah kegiatan fasilitasi PKB   | 0 Kegiatan                               | 0 Kegiatan              | 3 Kegiatan                            | 300.000.000    | 3 Kegiatan              | 300.000.000    | 3 Kegiatan              | 300.000.000    | 3 Kegiatan              | 300.000.000    | 3 Kegiatan              | 300.000.000    | 3 Kegiatan                                      | 1.500.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26.3 | Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidid  | 1. Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK                        | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 160 Orang                             | 700.000.000    | 160 Orang               | 700.000.000    | 160 Orang               | 700.000.000    | 160 Orang               | 700.000.000    | 160 Orang               | 700.000.000    | 160 Orang                                       | 3.500.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                  |  | 2. Jumlah peserta bintek Tim PAK   | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 30 Orang                              |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang  |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 3. Jumlah peserta bintek assesor PKG                                       | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 40 Orang                              |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang  |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 4. Jumlah peserta bintek guru sekolah inklusi                              | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 40 Orang                              |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang  |                 |  |                                 |
|        |         |                  |  | 5. Jumlah peserta bintek pendidikan karakter                               | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 40 Orang                              |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang                |                | 40 Orang  |                 |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26.4 | Penilaian Angka Kredit (PAK)   | Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit                                 | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 3800 Orang                            | 177.500.000    | 3800 Orang              | 177.500.000    | 3800 Orang              | 177.500.000    | 3800 Orang              | 177.500.000    | 3800 Orang              | 177.500.000    | 3800 Orang                                      | 887.500.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.26.5 | Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas  | Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya                  | 0 Orang                                  | 0 Orang                 | 4000 Orang                            | 75.000.000     | 4000 Orang              | 75.000.000     | 4000 Orang              | 75.000.000     | 4000 Orang              | 75.000.000     | 4000 Orang              | 75.000.000     | 4000 Orang                                      | 375.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran  | Kode             | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                     | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|--|------------------|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|--|---------------------------------|
|        |  |                  |  |  | 2018                                     | 2019                | 2020                                  |                 | 2021                |                 | 2022                |                 | 2023                |                 | 2024                |                 | Target  | Rp.             |  |                                 |
|        |  |                  |  |  | Target                                   | Target              | Target                                | Rp.             | Target              | Rp.             | Target              | Rp.             | Target              | Rp.             | Target              | Rp.             | Target  | Rp.             |  |                                 |
| 1      | 2  | 3                | 4  | 5  | 6  | 7                   | 8                                     | 9               | 10                  | 11              | 12                  | 13              | 14                  | 15              | 16                  | 17              | 18  | 19              | 20   | 21                              |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.26.6 | Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi                     | Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal | 0 Kegiatan                               | 0 Kegiatan          | 3 Kegiatan                            | 385.000.000     | 3 Kegiatan          | 385.000.000     | 3 Kegiatan          | 385.000.000     | 3 Kegiatan          | 385.000.000     | 3 Kegiatan          | 385.000.000     | 3 Kegiatan                                      | 1.925.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.26.7 | BOSDA (Sekolah Negeri)   | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan BOSDA                 | 0 orang                                  | 0 orang             | 1662 orang                            | 37.265.472.000  | 1662 orang          | 37.265.472.000  | 1662 orang          | 37.265.472.000  | 1662 orang          | 37.265.472.000  | 1662 orang          | 37.265.472.000  | 1662 orang                                      | 186.327.360.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.26.8 | Peningkatan Kreativitas Pegawai  | Jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai                        | 0 Orang                                  | 0 Orang             | 50 Orang                              | 50.000.000      | 50 Orang            | 50.000.000      | 50 Orang            | 50.000.000      | 50 Orang            | 50.000.000      | 50 Orang            | 50.000.000      | 50 Orang  | 250.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.26.9 | Pengembangan Karir   | 1. Jumlah kepala sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS                          | na orang                                 | na orang            | 78 orang                              | 400.000.000     | 78 orang            | 400.000.000     | 78 orang            | 400.000.000     | 78 orang            | 400.000.000     | 78 orang            | 400.000.000     | 78 orang  | 2.000.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  |                  |  | 2. Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan pengawas               | na orang                                 | na orang            | 60 orang                              |                 | 60 orang            |                 | 60 orang            |                 | 60 orang            |                 | 60 orang            |                 | 60 orang  |                 |  |                                 |
|        | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan |                  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK)  | 87,74 angka (0-100)                      | 87,92 angka (0-100) | 89,02 angka (0-100)                   | 148.573.637.000 | 90,12 angka (0-100) | 149.554.637.000 | 91,22 angka (0-100) | 149.093.137.000 | 92,31 angka (0-100) | 150.366.637.000 | 93,41 angka (0-100) | 150.404.637.000 | 93,41 angka (0-100)                             | 747.992.685.000 |  |                                 |
|        |  |                  |  | Angka Partisipasi Murni (APM)  | 83,13 angka (0-100)                      | 83,82 angka (0-100) | 84,50 angka (0-100)                   |                 | 85,19 angka (0-100) |                 | 85,87 angka (0-100) |                 | 86,56 angka (0-100) |                 | 87,24 angka (0-100) |                 | 87,24 angka (0-100)                             |                 |  |                                 |
|        |  |                  |  | Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  | 94,78 angka (0-100)                      | 95,42 angka (0-100) | 95,96 angka (0-100)                   |                 | 96,40 angka (0-100) |                 | 97,03 angka (0-100) |                 | 97,65 angka (0-100) |                 | 98,28 angka (0-100) |                 | 98,28 angka (0-100)                             |                 |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.8    | Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja   | 0 %                                      | 0 %                 | 100 %                                 | 2.130.000.000   | 100 %               | 2.145.000.000   | 100 %               | 727.500.000     | 100 %               | 2.170.000.000   | 100 %               | 2.170.000.000   | 100 %   | 9.342.500.000   |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.8.1  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                      | 1. jumlah bulan pelayanan jasa   | 0 bulan                                  | 0 bulan             | 12 bulan                              | 335.000.000     | 12 bulan            | 335.000.000     | 12 bulan            | 335.000.000     | 12 bulan            | 335.000.000     | 12 bulan            | 335.000.000     | 12 bulan  | 1.675.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  |                  |  | 2. Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti  | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah           | 59 Sekolah                            |                 | 59 Sekolah          |                 | 59 Sekolah          |                 | 59 Sekolah          |                 | 59 Sekolah          |                 | 59 Sekolah                                      |                 |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.8.2  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | 1. Dokumen Renstra yang tersusun   | 0 Dokumen                                | 0 Dokumen           | 0 Dokumen                             | 135.000.000     | 0 Dokumen           | 135.000.000     | 0 Dokumen           | 135.000.000     | 0 Dokumen           | 135.000.000     | 0 Dokumen           | 135.000.000     | 0 Dokumen                                       | 675.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  |                  |  | 2. Dokumen Renja yang tersusun   | 0 Dokumen                                | 0 Dokumen           | 1 Dokumen                             |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |  |                  |  | 3. Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun                                     | 0 Dokumen                                | 0 Dokumen           | 1 Dokumen                             |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.8.3  | Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJP, LKPI, LPPD, PK dan RFK)           | 0 Laporan                                | 0 Laporan           | 17 Laporan                            | 1.560.000.000   | 17 Laporan          | 1.575.000.000   | 17 Laporan          | 157.500.000     | 17 Laporan          | 1.600.000.000   | 17 Laporan          | 1.600.000.000   | 17 Laporan                                      | 6.492.500.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  |                  |  | 2. Tersedianya data pokok pendidikan online                                    | 0 data online                            | 0 data online       | 1 data online                         |                 | 1 data online       |                 | 1 data online       |                 | 1 data online       |                 | 1 data online       |                 | 1 data online                                   |                 |  |                                 |
|        |  |                  |  | 3. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun                        | na Dokumen                               | na Dokumen          | 1 Dokumen                             |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen           |                 | 1 Dokumen                                       |                 |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.8.4  | Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah | 1. Laporan SPM   | 0 Dokumen                                | 0 Dokumen           | 1 Dokumen                             | 100.000.000     | 1 Dokumen           | 100.000.000     | 1 Dokumen           | 100.000.000     | 1 Dokumen           | 100.000.000     | 1 Dokumen           | 100.000.000     | 1 Dokumen                                       | 500.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |  |                  |  | 2. Jumlah SOP yang disahkan  | 0 SOP                                    | 0 SOP               | 5 SOP                                 |                 | 5 SOP               |                 | 5 SOP               |                 | 5 SOP               |                 | 5 SOP               |                 | 5 SOP   |                 |  |                                 |
|        |  | 1.1.1.1.1.1.23   | Program Pendidikan Sekolah Dasar   | 1. Angka Putus Sekolah SD/MI   | 0,07 %                                   | 0,07 %              | 0,06 %                                | 89.844.526.000  | 0,06 %              | 90.164.526.000  | 0,05 %              | 90.848.526.000  | 0,05 %              | 90.628.526.000  | 0,05 %              | 90.512.526.000  | 0,05 %  | 451.998.630.000 |  |                                 |
|        |  |                  |  | 2. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs  | 91,30 %                                  | 91,85 %             | 91,95 %                               |                 | 92,00 %             |                 | 92,10 %             |                 | 92,30 %             |                 | 92,50 %             |                 | 92,50 %   |                 |  |                                 |
|        |  |                  |  | 3. Persentase SD dengan Siswa Ideal  | 39,17 %                                  | 39,50 %             | 40 %                                  |                 | 40,56 %             |                 | 40,89 %             |                 | 41,29 %             |                 | 41,53 %             |                 | 41,53 %   |                 |  |                                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |             |               |             |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--|---------------------------------|
|        |         |                 |   |  | 2018                                     | 2019      | 2020                                  |               | 2021        |               | 2022        |               | 2023        |               | 2024        |               | Target  | Rp.            |  |                                 |
|        |         |                 |   |  | Target                                   | Target    | Target                                | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target  | Rp.            |  |                                 |
| 1      | 2       | 3               | 4   | 5  | 6  | 7         | 8                                     | 9             | 10          | 11            | 12          | 13            | 14          | 15            | 16          | 17            | 18  | 19             | 20   | 21                              |
|        |         |                 |   | 4. Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter                       | NA %                                     | NA %      | 25.04 %                               |               | 50.08 %     |               | 75.00 %     |               | 100 %       |               | 100 %       |               | 100 %   |                |  |                                 |
|        |         |                 |   | 5. Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)   | 71.31 %                                  | 72.14 %   | 73.13 %                               |               | 73.96 %     |               | 74.96 %     |               | 75.79 %     |               | 76.62 %     |               | 76.6 %  |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.1  | Penyelenggaraan US-USBN SD/MI   | Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi               | 0 sekolah                                | 0 sekolah | 905 sekolah                           | 735.741.000   | 907 sekolah | 735.741.000   | 907 sekolah | 735.741.000   | 907 sekolah | 735.741.000   | 907 sekolah | 735.741.000   | 907 sekolah                                     | 3.678.705.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.4  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 30 SD                                 | 3.512.000.000 | 30 SD       | 3.516.000.000 | 30 SD       | 3.520.000.000 | 30 SD       | 3.524.000.000 | 30 SD       | 3.528.000.000 | 30 SD   | 17.600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.5  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 27 SD                                 | 2.903.200.000 | 27 SD       | 2.907.200.000 | 27 SD       | 2.911.200.000 | 27 SD       | 2.915.200.000 | 27 SD       | 2.919.200.000 | 27 SD   | 14.556.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.6  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 19 SD                                 | 1.524.800.000 | 19 SD       | 1.528.800.000 | 19 SD       | 1.532.800.000 | 19 SD       | 1.536.800.000 | 19 SD       | 1.540.800.000 | 19 SD   | 7.664.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.7  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 19 SD                                 | 2.004.000.000 | 19 SD       | 2.008.000.000 | 19 SD       | 2.012.000.000 | 19 SD       | 2.016.000.000 | 19 SD       | 2.020.000.000 | 19 SD   | 10.060.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.8  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 27 SD                                 | 2.015.200.000 | 27 SD       | 2.019.200.000 | 27 SD       | 2.023.200.000 | 27 SD       | 2.027.200.000 | 27 SD       | 2.031.200.000 | 27 SD   | 10.116.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.9  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 25 SD                                 | 2.082.400.000 | 25 SD       | 2.086.400.000 | 25 SD       | 2.090.400.000 | 25 SD       | 2.094.400.000 | 25 SD       | 2.098.400.000 | 25 SD   | 10.452.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.10 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 28 SD                                 | 2.813.600.000 | 28 SD       | 2.817.600.000 | 28 SD       | 2.821.600.000 | 28 SD       | 2.825.600.000 | 28 SD       | 2.829.600.000 | 28 SD   | 14.108.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.11 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 30 SD                                 | 3.840.000.000 | 30 SD       | 3.844.000.000 | 30 SD       | 3.848.000.000 | 30 SD       | 3.848.000.000 | 30 SD       | 3.852.000.000 | 30 SD   | 19.232.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.12 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 24 SD                                 | 2.842.400.000 | 24 SD       | 2.846.400.000 | 24 SD       | 2.850.400.000 | 24 SD       | 2.854.400.000 | 24 SD       | 2.858.400.000 | 24 SD   | 14.252.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.13 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 36 SD                                 | 4.432.000.000 | 36 SD       | 4.436.000.000 | 36 SD       | 4.440.000.000 | 36 SD       | 4.444.000.000 | 36 SD       | 4.448.000.000 | 36 SD   | 22.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.14 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 23 SD                                 | 2.841.600.000 | 23 SD       | 2.845.600.000 | 23 SD       | 2.849.600.000 | 23 SD       | 2.853.600.000 | 23 SD       | 2.857.600.000 | 23 SD   | 14.248.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.15 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 29 SD                                 | 2.760.800.000 | 29 SD       | 2.764.800.000 | 29 SD       | 2.768.800.000 | 29 SD       | 2.772.800.000 | 29 SD       | 2.776.800.000 | 29 SD   | 13.844.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.23.16 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD      | 23 SD                                 | 2.438.400.000 | 23 SD       | 2.442.400.000 | 23 SD       | 2.446.400.000 | 23 SD       | 2.450.400.000 | 23 SD       | 2.454.400.000 | 23 SD   | 12.232.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                  | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---|----------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |  |  | 2018                                     | 2019             | 2020                                  |               | 2021               |               | 2022               |               | 2023               |               | 2024               |               | Target  | Rp.            |  |                                 |
|        |         |                   |  |  | Target                                   | Target           | Target                                | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target  | Rp.            |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                | 8                                     | 9             | 10                 | 11            | 12                 | 13            | 14                 | 15            | 16                 | 17            | 18  | 19             | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.17 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 27 SD                                 | 2.537.600.000 | 27 SD              | 2.541.600.000 | 27 SD              | 2.545.600.000 | 27 SD              | 2.549.600.000 | 27 SD              | 2.553.600.000 | 27 SD   | 12.728.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.18 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 26 SD                                 | 2.616.800.000 | 26 SD              | 2.620.800.000 | 26 SD              | 2.624.800.000 | 26 SD              | 2.628.800.000 | 26 SD              | 2.632.800.000 | 26 SD   | 13.124.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.19 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis      | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 31 SD                                 | 3.080.000.000 | 31 SD              | 3.084.000.000 | 31 SD              | 3.088.000.000 | 31 SD              | 3.092.000.000 | 31 SD              | 3.096.000.000 | 31 SD   | 15.440.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.20 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 23 SD                                 | 2.345.600.000 | 23 SD              | 2.345.600.000 | 23 SD              | 2.349.600.000 | 23 SD              | 2.353.600.000 | 23 SD              | 2.357.600.000 | 23 SD   | 11.752.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.21 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag          | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 27 SD                                 | 4.817.600.000 | 27 SD              | 4.821.600.000 | 27 SD              | 4.825.600.000 | 27 SD              | 4.829.600.000 | 27 SD              | 4.833.600.000 | 27 SD   | 24.128.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.22 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 26 SD                                 | 2.886.400.000 | 26 SD              | 2.870.400.000 | 26 SD              | 2.874.400.000 | 26 SD              | 2.878.400.000 | 26 SD              | 2.882.400.000 | 26 SD   | 14.392.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.23 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 23 SD                                 | 3.232.800.000 | 23 SD              | 3.236.800.000 | 23 SD              | 3.240.800.000 | 23 SD              | 3.244.800.000 | 23 SD              | 3.248.800.000 | 23 SD   | 16.204.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.24 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 SD                                     | 0 SD             | 21 SD                                 | 2.404.000.000 | 21 SD              | 2.408.000.000 | 21 SD              | 2.412.000.000 | 21 SD              | 2.416.000.000 | 21 SD              | 2.420.000.000 | 21 SD   | 12.060.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.25 | Pengembangan Kurikulum SD  | 1. Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangannya kurikulumnya           | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 263 Sekolah                           | 720.000.000   | 342 Sekolah        | 720.000.000   | 342 Sekolah        | 720.000.000   | 342 Sekolah        | 720.000.000   | 342 Sekolah        | 720.000.000   | 342 Sekolah                                     | 3.600.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah guru yang dibintek kurikulum baru                                | 0 guru                                   | 0 guru           | 1000 guru                             |               | 1400 guru          |               | 1400 guru          |               | 1400 guru          |               | 1400 guru          |               | 1400 guru                                       |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.26 | Pendampingan BSM dan Gulkin SD                                       | 1. Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi                          | 0 Siswa                                  | 0 Siswa          | 42000 Siswa                           | 90.000.000    | 45000 Siswa        | 90.000.000    | 45000 Siswa        | 90.000.000    | 45000 Siswa        | 90.000.000    | 45000 Siswa        | 90.000.000    | 45000 Siswa                                     | 450.000.000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi                               | 0 Siswa                                  | 0 Siswa          | 630 Siswa                             |               | 630 Siswa          |               | 840 Siswa          |               | 840 Siswa          |               | 840 Siswa          |               | 840 Siswa                                       |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.27 | Penyelenggaraan MBS SD   | 1. Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS                                   | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 21 Sekolah                            | 344.740.000   | 42 Sekolah         | 344.740.000   | 42 Sekolah         | 344.740.000   | 42 Sekolah         | 344.740.000   | 42 Sekolah         | 344.740.000   | 42 Sekolah                                      | 1.723.700.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS                         | 0 Komite sekolah                         | 0 Komite sekolah | 105 Komite sekolah                    |               | 105 Komite sekolah |               | 105 Komite sekolah |               | 105 Komite sekolah |               | 105 Komite sekolah |               | 105 Komite sekolah                              |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.28 | Pendampingan Operasional BOS SD                                      | 1. Jumlah SD penerima BOS  | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 603 Sekolah                           | 3.753.680.000 | 604 Sekolah        | 3.753.680.000 | 604 Sekolah        | 3.753.680.000 | 604 Sekolah        | 3.753.680.000 | 604 Sekolah        | 3.753.680.000 | 604 Sekolah                                     | 18.768.400.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah penerima BOSDA SDS/MIS   | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 360 Sekolah                           |               | 361 Sekolah        |               | 361 Sekolah        |               | 361 Sekolah        |               | 361 Sekolah        |               | 361 Sekolah                                     |                |  |                                 |
|        |         |                   |  | 3. Jumlah penerima BOSDA SDN   | 0 Siswa                                  | 0 Siswa          | 86342 Siswa                           |               | 86342 Siswa        |               | 86342 Siswa        |               | 86342 Siswa        |               | 86342 Siswa        |               | 86342 Siswa                                     |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.29 | Fasilitasi dan Pengembangan SD                                       | 1. Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan             | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 19 Sekolah                            | 820.000.000   | 21 Sekolah         | 820.000.000   | 21 Sekolah         | 820.000.000   | 21 Sekolah         | 820.000.000   | 21 Sekolah         | 820.000.000   | 21 Sekolah                                      | 4.100.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah sekolah inkusi yang mendapat pendampingan                        | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 30 Sekolah                            |               | 35 Sekolah         |               | 35 Sekolah         |               | 35 Sekolah         |               | 35 Sekolah         |               | 35 Sekolah                                      |                |  |                                 |
|        |         |                   |  | 3. Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan                     | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 42 Sekolah                            |               | 42 Sekolah         |               | 42 Sekolah         |               | 42 Sekolah         |               | 42 Sekolah         |               | 42 Sekolah                                      |                |  |                                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                  | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                |             |                    |             |                |                    |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |  |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--|---------------------------------|--|
|        |         |                   |  |  | 2018                                     | 2019             | 2020                                  |                | 2021               |                | 2022        |                    | 2023        |                | 2024               |                | Target  | Rp.             |  |                                 |  |
|        |         |                   |  |  | Target                                   | Target           | Target                                | Rp.            | Target             | Rp.            | Target      | Rp.                | Target      | Rp.            | Target             | Rp.            | Target  | Rp.             |  |                                 |  |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                | 8                                     | 9              | 10                 | 11             | 12          | 13                 | 14          | 15             | 16                 | 17             | 18  | 19              | 20   | 21                              |  |
|        |         |                   |  | 4. Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP                           | 0 siswa dan guru                         | 0 siswa dan guru | 100 siswa dan guru                    |                | 125 siswa dan guru |                |             | 150 siswa dan guru |             |                | 175 siswa dan guru |                | 200 siswa dan guru                              |                 | 200 siswa dan guru                           |                                 |  |
|        |         |                   |  | 5. Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program rumah anak    | 0 sekolah                                | 0 sekolah        | 21 sekolah                            |                | 21 sekolah         |                |             | 21 sekolah         |             |                | 21 sekolah         |                | 21 sekolah                                      |                 | 105 sekolah                                  |                                 |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.30 | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD                            | Jumlah sekolah yang difasilitasi penataan kelembagaan                      | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 50 Sekolah                            | 20.000.000     | 50 Sekolah         | 20.000.000     | 50 Sekolah  | 20.000.000         | 50 Sekolah  | 20.000.000     | 50 Sekolah         | 20.000.000     | 50 Sekolah                                      | 100.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.31 | Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik                            | 1. Jumlah lomba yang terselenggara   | 0 Kegiatan                               | 0 Kegiatan       | 52 Kegiatan                           | 1.435.715.000  | 52 Kegiatan        | 1.435.715.000  | 55 Kegiatan | 1.435.715.000      | 55 Kegiatan | 1.435.715.000  | 55 Kegiatan        | 1.435.715.000  | 55 Kegiatan                                     | 7.178.575.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah penerima beasiswa prestasi                                       | 0 Siswa                                  | 0 Siswa          | 1859 Siswa                            |                | 1859 Siswa         |                |             | 1859 Siswa         |             |                | 1859 Siswa         |                | 1859 Siswa                                      |                 | 1859 Siswa                                   |                                 |  |
|        |         |                   |  | 3. Jumlah sekolah pengimplementasi pendidikan karakter                     | 0 sekolah                                | 0 sekolah        | 120 sekolah                           |                | 151 sekolah        |                |             | 151 sekolah        |             |                | 151 sekolah        |                | 151 sekolah                                     |                 | 151 sekolah                                  |                                 |  |
|        |         |                   |  | 4. Jumlah juknis pendidikan karakter                                       | 0 juknis                                 | 0 juknis         | 1 juknis                              |                | 1 juknis           |                |             | 1 juknis           |             |                | 1 juknis           |                | 1 juknis  |                 | 1 juknis                                     |                                 |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.32 | Pembinaan Pendidikan Karakter SD                                     | Jumlah penyelenggara sekolah berkarakter                                   | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 0 Sekolah                             | 0              | 151 Sekolah        | 150.000.000    | 151 Sekolah | 150.000.000        | 151 Sekolah | 150.000.000    | 151 Sekolah        | 150.000.000    | 151 Sekolah                                     | 600.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.33 | Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD                                  | 1. Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan                                 | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 21 Sekolah                            | 289.450.000    | 21 Sekolah         | 289.450.000    | 21 Sekolah  | 289.450.000        | 21 Sekolah  | 289.450.000    | 21 Sekolah         | 289.450.000    | 21 Sekolah                                      | 1.447.250.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         |                   |  | 2. Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya                | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 100 Sekolah                           |                | 125 Sekolah        |                |             | 125 Sekolah        |             |                | 125 Sekolah        |                | 125 Sekolah                                     |                 | 125 Sekolah                                  |                                 |  |
|        |         |                   |  | 3. Jumlah sekolah peserta lomba gugus ( SD Inti )                          | 0 SD Inti                                | 0 SD Inti        | 93 SD Inti                            |                | 93 SD Inti         |                |             | 93 SD Inti         |             |                | 93 SD Inti         |                | 93 SD Inti                                      |                 | 93 SD Inti                                   |                                 |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.34 | Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)       | Jumlah paket bantuan   | 0 paket                                  | 0 paket          | 5 paket                               | 30.000.000     | 5 paket            | 30.000.000     | 5 paket     | 30.000.000         | 5 paket     | 30.000.000     | 5 paket            | 30.000.000     | 5 paket   | 150.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.35 | Pengadaan Tanah untuk Pengembangan SD                                | Luas lahan pengembangan sekolah  | 0 M2                                     | 0 M2             | 0 M2                                  | 0              | 0 M2               | 0              | 500 M2      | 500.000.000        | 200 M2      | 200.000.000    | 0 M2               | 0              | 0 M2  | 700.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.36 | Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK) | Jumlah penerima bantuan  | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 211 Sekolah                           | 15.834.000.000 | 226 Sekolah        | 15.834.000.000 | 241 Sekolah | 15.834.000.000     | 257 Sekolah | 15.834.000.000 | 272 Sekolah        | 15.834.000.000 | 272 Sekolah                                     | 79.170.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.37 | Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta       | Jumlah penerima bantuan  | 0 Sekolah                                | 0 Sekolah        | 50 Sekolah                            | 5.790.000.000  | 50 Sekolah         | 5.900.000.000  | 50 Sekolah  | 6.000.000.000      | 50 Sekolah  | 6.000.000.000  | 50 Sekolah         | 6.000.000.000  | 50 Sekolah                                      | 29.690.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.23.38 | Fasilitasi PPDB SD   | Jumlah SDN yang melaksanakan PPDB  | 0 SD                                     | 0 SD             | 554 SD                                | 50.000.000     | 554 SD             | 50.000.000     | 554 SD      | 50.000.000         | 554 SD      | 50.000.000     | 554 SD             | 50.000.000     | 554 SD  | 250.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24    | Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                          | 1. Angka Putus Sekolah SMP/MTs   | 0,26 %                                   | 0,25 %           | 0,24 %                                | 48.738.245.000 | 0,23 %             | 49.384.245.000 | 0,22 %      | 49.656.245.000     | 0,22 %      | 49.707.245.000 | 0,21 %             | 49.861.245.000 | 0,21 %  | 247.347.225.000 |  |                                 |  |
|        |         |                   |  | 2. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                                 | NA %                                     | 79,60 %          | 79,95 %                               |                | 80,45 %            |                |             | 80,65 %            |             |                | 80,85 %            |                | 81,00 %   |                 | 81,00 %                                      |                                 |  |
|        |         |                   |  | 3. Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter                      | NA %                                     | NA %             | 38,46 %                               |                | 53,85 %            |                |             | 69,23 %            |             |                | 84,62 %            |                | 100 %   |                 | 100 %  |                                 |  |
|        |         |                   |  | 4. Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal                                | 34,38 %                                  | 35,16 %          | 35,94 %                               |                | 36,72 %            |                |             | 37,5 %             |             |                | 38,28 %            |                | 39,06 %   |                 | 39,06 %                                      |                                 |  |
|        |         |                   |  | 5. Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)  | 65,89 %                                  | 70,54 %          | 72,87 %                               |                | 74,42 %            |                |             | 76,74 %            |             |                | 79,07 %            |                | 80,62 %   |                 | 80,62 %                                      |                                 |  |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |         | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|---------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |  |  | 2018                                     | 2019    | 2020                                  |             | 2021      |             | 2022      |             | 2023      |             | 2024      |             | Target  | Rp.           |  |                                 |
|        |         |                   |  |  | Target                                   | Target  | Target                                | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target  | Rp.           |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7       | 8                                     | 9           | 10        | 11          | 12        | 13          | 14        | 15          | 16        | 17          | 18  | 19            | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.1  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 556 Siswa                             | 556.000.000 | 587 Siswa | 587.000.000 | 588 Siswa | 588.000.000 | 588 Siswa | 588.000.000 | 588 Siswa | 588.000.000 | 588 Siswa                                       | 2.907.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.2  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.3  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 664 Siswa                             | 664.000.000 | 668 Siswa | 668.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa                                       | 3.348.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.4  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 586 Siswa                             | 586.000.000 | 588 Siswa | 588.000.000 | 588 Siswa                                       | 2.938.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.5  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 354 Siswa                             | 354.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.890.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.6  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.7  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 686 Siswa                             | 697.000.000 | 697 Siswa | 697.000.000 | 697 Siswa | 697.000.000 | 697 Siswa | 697.000.000 | 697 Siswa | 697.000.000 | 697 Siswa                                       | 3.485.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.8  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 261 Siswa                             | 261.000.000 | 286 Siswa | 286.000.000 | 288 Siswa | 288.000.000 | 288 Siswa | 288.000.000 | 288 Siswa | 288.000.000 | 288 Siswa                                       | 1.411.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.9  | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 650 Siswa                             | 650.000.000 | 657 Siswa | 657.000.000 | 664 Siswa | 664.000.000 | 662 Siswa | 662.000.000 | 662 Siswa | 662.000.000 | 662 Siswa                                       | 3.295.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.10 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 449 Siswa                             | 431.000.000 | 477 Siswa | 431.000.000 | 480 Siswa                                       | 2.155.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.11 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 508 Siswa                             | 508.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.812.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.12 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 261 Siswa                             | 261.000.000 | 265 Siswa | 265.000.000 | 290 Siswa | 290.000.000 | 300 Siswa | 300.000.000 | 300 Siswa | 300.000.000 | 300 Siswa                                       | 1.416.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.13 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 768 Siswa                             | 768.000.000 | 768 Siswa | 768.000.000 | 768 Siswa | 768.000.000 | 768 Siswa | 768.000.000 | 768 Siswa | 768.000.000 | 768 Siswa                                       | 3.840.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.14 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 480 Siswa                             | 160.000.000 | 480 Siswa | 160.000.000 | 480 Siswa | 160.000.000 | 480 Siswa | 160.000.000 | 480 Siswa | 160.000.000 | 480 Siswa                                       | 800.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.15 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 571 Siswa                             | 571.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.875.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |         | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|---|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|---------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |   |  | 2018                                     | 2019    | 2020                                  |             | 2021      |             | 2022      |             | 2023      |             | 2024      |             | Target  | Rp.           |  |                                 |
|        |         |                   |   |  | Target                                   | Target  | Target                                | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target  | Rp.           |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7       | 8                                     | 9           | 10        | 11          | 12        | 13          | 14        | 15          | 16        | 17          | 18  | 19            | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.16 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 608 Siswa                             | 608.000.000 | 640 Siswa | 640.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa                                       | 3.264.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.17 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.18 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 475 Siswa                             | 475.000.000 | 480 Siswa | 480.000.000 | 480 Siswa                                       | 2.395.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.19 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 638 Siswa                             | 638.000.000 | 608 Siswa | 608.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.974.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.20 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 260 Siswa                             | 260.000.000 | 280 Siswa | 280.000.000 | 300 Siswa | 300.000.000 | 320 Siswa | 320.000.000 | 320 Siswa | 320.000.000 | 320 Siswa                                       | 1.480.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.21 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.22 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 503 Siswa                             | 503.000.000 | 544 Siswa | 544.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.775.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.23 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 567 Siswa                             | 567.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.871.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.24 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 559 Siswa                             | 559.000.000 | 574 Siswa | 574.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.861.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.25 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 446 Siswa                             | 446.000.000 | 448 Siswa | 448.000.000 | 480 Siswa | 480.000.000 | 480 Siswa | 480.000.000 | 480 Siswa | 480.000.000 | 480 Siswa                                       | 2.334.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.26 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 663 Siswa                             | 663.000.000 | 671 Siswa | 671.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa                                       | 3.350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.27 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 667 Siswa                             | 667.000.000 | 670 Siswa | 670.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa | 672.000.000 | 672 Siswa                                       | 3.353.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.28 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 529 Siswa                             | 529.000.000 | 540 Siswa | 540.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.797.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.29 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 138 Siswa                             | 138.000.000 | 141 Siswa | 141.000.000 | 150 Siswa | 150.000.000 | 150 Siswa | 150.000.000 | 150 Siswa | 150.000.000 | 150 Siswa                                       | 729.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.30 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 566 Siswa                             | 566.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.870.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |         | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|---------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |  |  | 2018                                     | 2019    | 2020                                  |             | 2021      |             | 2022      |             | 2023      |             | 2024      |             | Target  | Rp.           |  |                                 |
|        |         |                   |  |  | Target                                   | Target  | Target                                | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         | Target    | Rp.         |   |               |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7       | 8                                     | 9           | 10        | 11          | 12        | 13          | 14        | 15          | 16        | 17          | 18  | 19            | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.31 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG      | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 744 Siswa                             | 744.000.000 | 750 Siswa | 750.000.000 | 750 Siswa                                       | 3.744.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.32 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG      | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 269 Siswa                             | 269.000.000 | 288 Siswa | 288.000.000 | 288 Siswa                                       | 1.421.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.33 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.34 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 392 Siswa                             | 392.000.000 | 480 Siswa | 480.000.000 | 480 Siswa                                       | 2.312.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.35 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN    | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 361 Siswa                             | 361.000.000 | 381 Siswa | 381.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.894.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.36 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 574 Siswa                             | 574.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.878.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.37 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 567 Siswa                             | 567.000.000 | 572 Siswa | 572.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.867.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.38 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO  | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 245 Siswa                             | 245.000.000 | 277 Siswa | 277.000.000 | 277 Siswa | 277.000.000 | 277 Siswa | 277.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.460.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.39 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 576 Siswa                             | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 576 Siswa                                       | 2.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.40 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 563 Siswa                             | 563.000.000 | 569 Siswa | 569.000.000 | 576 Siswa | 576.000.000 | 583 Siswa | 583.000.000 | 590 Siswa | 590.000.000 | 590 Siswa                                       | 2.881.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.41 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 535 Siswa                             | 535.000.000 | 545 Siswa | 545.000.000 | 545 Siswa | 545.000.000 | 551 Siswa | 551.000.000 | 553 Siswa | 553.000.000 | 553 Siswa                                       | 2.729.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.42 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 776 Siswa                             | 776.000.000 | 776 Siswa | 776.000.000 | 776 Siswa | 776.000.000 | 776 Siswa | 776.000.000 | 776 Siswa | 776.000.000 | 776 Siswa                                       | 3.880.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.43 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 359 Siswa                             | 359.000.000 | 379 Siswa | 379.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.890.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.44 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 436 Siswa                             | 294.000.000 | 436 Siswa | 352.000.000 | 436 Siswa | 384.000.000 | 436 Siswa | 384.000.000 | 436 Siswa | 384.000.000 | 436 Siswa                                       | 1.798.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.45 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa | 272 Siswa                             | 272.000.000 | 287 Siswa | 287.000.000 | 315 Siswa | 315.000.000 | 325 Siswa | 325.000.000 | 335 Siswa | 335.000.000 | 335 Siswa                                       | 1.534.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                    | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---|---------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |  |  | 2018                                     | 2019               | 2020                                  |             | 2021                 |             | 2022                 |             | 2023                 |             | 2024                 |             | Target  | Rp.           |  |                                 |
|        |         |                   |  |  | Target                                   | Target             | Target                                | Rp.         | Target               | Rp.         | Target               | Rp.         | Target               | Rp.         | Target               | Rp.         | Target  | Rp.           |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                  | 8                                     | 9           | 10                   | 11          | 12                   | 13          | 14                   | 15          | 16                   | 17          | 18  | 19            | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.46 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS                     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 384 Siswa                             | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.920.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.47 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS                     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 384 Siswa                             | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.920.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.48 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS                     | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 341 Siswa                             | 341.000.000 | 349 Siswa            | 349.000.000 | 349 Siswa                                       | 1.737.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.49 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAK                   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 436 Siswa                             | 162.000.000 | 436 Siswa            | 162.000.000 | 436 Siswa            | 162.000.000 | 436 Siswa            | 162.000.000 | 436 Siswa            | 162.000.000 | 436 Siswa                                       | 810.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.50 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAK                   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 162 Siswa                             | 96.000.000  | 162 Siswa            | 96.000.000  | 162 Siswa            | 96.000.000  | 162 Siswa            | 96.000.000  | 162 Siswa            | 96.000.000  | 162 Siswa                                       | 480.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.51 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI                 | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 364 Siswa                             | 364.000.000 | 404 Siswa            | 404.000.000 | 404 Siswa                                       | 1.980.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.52 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI                 | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 380 Siswa                             | 380.000.000 | 384 Siswa            | 384.000.000 | 384 Siswa                                       | 1.916.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.53 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR           | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 82 Siswa                              | 82.000.000  | 83 Siswa             | 83.000.000  | 83 Siswa             | 83.000.000  | 84 Siswa             | 84.000.000  | 84 Siswa             | 84.000.000  | 84 Siswa  | 416.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.54 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS      | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 196 Siswa                             | 196.000.000 | 200 Siswa            | 200.000.000 | 200 Siswa                                       | 996.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.55 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 51 Siswa                              | 51.000.000  | 49 Siswa             | 49.000.000  | 60 Siswa             | 60.000.000  | 40 Siswa             | 40.000.000  | 60 Siswa             | 60.000.000  | 60 Siswa  | 260.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.56 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK       | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 100 Siswa                             | 100.000.000 | 105 Siswa            | 105.000.000 | 110 Siswa            | 110.000.000 | 115 Siswa            | 115.000.000 | 120 Siswa            | 120.000.000 | 120 Siswa                                       | 550.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.57 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN   | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 115 Siswa                             | 115.000.000 | 110 Siswa            | 110.000.000 | 117 Siswa            | 117.000.000 | 128 Siswa            | 128.000.000 | 130 Siswa            | 130.000.000 | 130 Siswa                                       | 600.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.58 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGRUK | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 380 Siswa                             | 288.000.000 | 380 Siswa            | 288.000.000 | 380 Siswa            | 288.000.000 | 380 Siswa            | 288.000.000 | 380 Siswa            | 288.000.000 | 380 Siswa                                       | 1.440.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.59 | Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN             | Jumlah siswa penerima BOS  | 0 Siswa                                  | 0 Siswa            | 72 Siswa                              | 72.000.000  | 77 Siswa             | 77.000.000  | 74 Siswa             | 74.000.000  | 77 Siswa             | 77.000.000  | 78 Siswa             | 78.000.000  | 78 Siswa  | 378.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.60 | Penyelenggaraan UN   | Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi  | 0 sekolah/madrasah                       | 0 sekolah/madrasah | 213 sekolah/madrasah                  | 525.000.000 | 213 sekolah/madrasah | 525.000.000 | 213 sekolah/madrasah | 525.000.000 | 213 sekolah/madrasah | 525.000.000 | 213 sekolah/madrasah | 525.000.000 | 213 sekolah/madrasah                            | 2.625.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                    | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |                                 |                                 |
|--------|---------|-------------------|---|---|--|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |         |                   |   |   | 2018                                     | 2019               | 2020                                  |               | 2021                 |               | 2022                 |               | 2023                 |               | 2024                 |               | Target  | Rp.           |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   |   | Target                                   | Target             | Target                                | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           | Target  | Rp.           |  |                                 |                                 |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4   | 5   | 6  | 7                  | 8                                     | 9             | 10                   | 11            | 12                   | 13            | 14                   | 15            | 16                   | 17            | 18  | 19            | 20   | 21                              |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.61 | Pendampingan Operasional BOS SMP                                | 1. Jumlah penerima BOS  | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 130 sekolah                           | 1.737.300.000 | 130 sekolah          | 1.737.300.000 | 130 sekolah          | 1.737.300.000 | 130 sekolah          | 1.737.300.000 | 130 sekolah          | 1.737.300.000 | 130 sekolah                                     | 8.686.500.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah SMP Swasta penerima BOSDA   | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 68 sekolah                            |               | 68 sekolah           |               | 68 sekolah           |               | 68 sekolah           |               | 68 sekolah           |               | 68 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah M.Ts penerima BOSDA   | 0 madrasah                               | 0 madrasah         | 71 madrasah                           |               | 71 madrasah          |               | 71 madrasah          |               | 71 madrasah          |               | 71 madrasah          |               | 71 madrasah                                     |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah laporan BOS   | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 130 sekolah                           |               | 130 sekolah          |               | 130 sekolah          |               | 130 sekolah          |               | 130 sekolah          |               | 130 sekolah                                     |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 5. Jumlah laporan BOSDA SMP Swasta dan M.Ts                                     | 0 sekolah/madrasah                       | 0 sekolah/madrasah | 139 sekolah/madrasah                  |               | 139 sekolah/madrasah |               | 139 sekolah/madrasah |               | 139 sekolah/madrasah |               | 139 sekolah/madrasah |               | 139 sekolah/madrasah                            |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.62 | Pengembangan dan penjaminan mutu SMP                            | 1. Jumlah mapel yang ditekankan   | 0 mapel                                  | 0 mapel            | 4 mapel                               | 1.030.000.000 | 4 mapel              | 1.030.000.000 | 4 mapel              | 1.030.000.000 | 4 mapel              | 1.030.000.000 | 4 mapel              | 1.030.000.000 | 4 mapel   | 5.150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan                             | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 21 sekolah                            |               | 21 sekolah           |               | 21 sekolah           |               | 21 sekolah           |               | 21 sekolah           |               | 21 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah sekolah yang disurveil akreditasi                                     | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 26 sekolah                            |               | 26 sekolah           |               | 26 sekolah           |               | 26 sekolah           |               | 26 sekolah           |               | 26 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi   | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 15 sekolah                            |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 5. Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari                                   | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 15 sekolah                            |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah           |               | 15 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.63 | Pendampingan BSM dan GULKIN SMP                                 | Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin   | 0 anak                                   | 0 anak             | 1250 anak                             | 655.000.000   | 1200 anak            | 655.000.000   | 1200 anak            | 655.000.000   | 1200 anak            | 655.000.000   | 1200 anak            | 655.000.000   | 1200 anak                                       | 3.275.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.64 | Pengembangan Kurikulum  | Jumlah sekolah yang difasilitasi pengutan kurikulum                             | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 130 sekolah                           | 200.000.000   | 130 sekolah          | 200.000.000   | 130 sekolah          | 200.000.000   | 130 sekolah          | 200.000.000   | 130 sekolah          | 200.000.000   | 130 sekolah                                     | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.65 | Fasilitasi PPDB   | Jumlah sekolah dengan PPDB Online   | 0 SMPN                                   | 0 SMPN             | 59 SMPN                               | 273.585.000   | 59 SMPN              | 273.585.000   | 59 SMPN              | 273.585.000   | 59 SMPN              | 273.585.000   | 59 SMPN              | 273.585.000   | 59 SMPN   | 1.367.925.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.66 | Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP                   | 1. Jumlah lomba yang terselenggara  | 0 kegiatan                               | 0 kegiatan         | 57 kegiatan                           | 1.300.000.000 | 57 kegiatan          | 1.300.000.000 | 57 kegiatan          | 1.300.000.000 | 57 kegiatan          | 1.300.000.000 | 57 kegiatan          | 1.300.000.000 | 57 kegiatan                                     | 6.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah penerima beasiswa prestasi  | 0 anak                                   | 0 anak             | 1300 anak                             |               | 1300 anak            |               | 1300 anak            |               | 1300 anak            |               | 1300 anak            |               | 1300 anak                                       |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 16 sekolah                            |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah                                      |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah juknis pendidikan karakter  | 0 juknis                                 | 0 juknis           | 1 juknis                              |               | 1 juknis             |               | 1 juknis             |               | 1 juknis             |               | 1 juknis             |               | 1 juknis  |               |  |                                 |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.67 | Fasilitasi dan pengembangan SMP                                 | 1. Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan                  | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 12 sekolah                            | 350.000.000   | 12 sekolah           | 350.000.000   | 12 sekolah           | 350.000.000   | 12 sekolah           | 350.000.000   | 12 sekolah           | 350.000.000   | 12 sekolah                                      | 350.000.000   | 60 sekolah                                   | 1.750.000.000                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan                            | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 4 sekolah                             |               | 4 sekolah            |               | 4 sekolah            |               | 4 sekolah            |               | 4 sekolah            |               | 4 sekolah                                       |               | 20 sekolah                                   |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan                          | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 8 sekolah                             |               | 8 sekolah            |               | 8 sekolah            |               | 8 sekolah            |               | 8 sekolah            |               | 8 sekolah                                       |               | 40 sekolah                                   |                                 |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak         | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 16 sekolah                            |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah           |               | 16 sekolah                                      |               | 90 sekolah                                   |                                 |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.68 | Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub) | Jumlah paket bantuan  | 0 Paket                                  | 0 Paket            | 4 Paket                               | 10.000.000    | 4 Paket              | 10.000.000    | 4 Paket              | 10.000.000    | 4 Paket              | 10.000.000    | 4 Paket              | 10.000.000    | 4 Paket   | 50.000.000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.70 | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP                      | Kesesuaian antar hasil akreditasi dengan layanan pendidikan                     | 0 sekolah                                | 0 sekolah          | 26 sekolah                            | 130.000.000   | 52 sekolah           | 130.000.000   | 52 sekolah           | 130.000.000   | 52 sekolah           | 130.000.000   | 52 sekolah           | 130.000.000   | 52 sekolah                                      | 650.000.000   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.71 | Pengadaan Tanah Pengembangan SMP                                | 1. Bidang tanah   | 0 bidang                                 | 0 bidang           | 0 bidang                              | 0             | 0 bidang             | 0             | 1 bidang             | 0             | 1 bidang             | 0             | 1 bidang             | 0             | 3 bidang  | 0             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |                                 |
|        |         |                   |   | 2. Dokumen FS   | 0 dok                                    | 0 dok              | 0 dok                                 |               | 1 dok                |               | 0 dok                |               | 0 dok                |               | 0 dok                |               | 0 dok   |               |  |                                 |                                 |                                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |             |               |             |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|--------|---------|-------------------|---|--|--|------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--|---------------------------------|
|        |         |                   |   |  | 2018                                     | 2019       | 2020                                  |               | 2021        |               | 2022        |               | 2023        |               | 2024        |               | Target  | Rp.            |  |                                 |
|        |         |                   |   |  | Target                                   | Target     | Target                                | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target  | Rp.            |  |                                 |
| 1      | 2       | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7          | 8                                     | 9             | 10          | 11            | 12          | 13            | 14          | 15            | 16          | 17            | 18  | 19             | 20   | 21                              |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.72 | Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP                                 | 1. Jumlah paket talud & pagar sekolah                                      | 0 paket                                  | 0 paket    | 12 paket                              | 9.767.360.000 | 12 paket    | 9.767.360.000 | 12 paket    | 9.767.360.000 | 12 paket    | 9.767.360.000 | 12 paket    | 9.767.360.000 | 12 paket  | 48.836.800.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah pengadaan media pembelajaran                                     | 0 unit                                   | 0 unit     | 333 unit                              |               | 273 unit    |               | 273 unit    |               | 273 unit    |               | 273 unit    |               | 273 unit  |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah pengadaan genset   | 0 unit                                   | 0 unit     | 3 unit                                |               | 26 unit     |               | 26 unit     |               | 26 unit     |               | 26 unit     |               | 26 unit   |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah paket pengadaan komputer jaringan                                | 0 paket                                  | 0 paket    | 10 paket                              |               | 18 paket    |               | 18 paket    |               | 18 paket    |               | 18 paket    |               | 18 paket  |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.24.73 | Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK) | Jumlah paket sarpras sekolah   | 0 paket                                  | 0 paket    | 26 paket                              | 7.252.000.000 | 52 paket    | 7.252.000.000 | 52 paket    | 7.252.000.000 | 52 paket    | 7.252.000.000 | 52 paket    | 7.252.000.000 | 52 paket  | 36.260.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.1.25  | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal           | 1. Persentase PNF Terakreditasi (LKP, PKBM)                                | 47.83 %                                  | 54.35 %    | 60.87 %                               | 7.860.866.000 | 67.39 %     | 7.860.866.000 | 73.91 %     | 7.860.866.000 | 82.61 %     | 7.860.866.000 | 89.13 %     | 7.860.866.000 | 89.13 %   | 39.304.330.000 |  |                                 |
|        |         |                   |   | 2. Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)                             | 29.33 %                                  | 37.75 %    | 48.99 %                               |               | 60.22 %     |               | 71.46 %     |               | 82.70 %     |               | 93.93 %     |               | 93.93 %   |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.1  | Pembelajaran PAUD   | 1. Pendidik PAUD yang mengikuti workshop                                   | 0 orang                                  | 0 orang    | 200 orang                             | 600.000.000   | 200 orang   | 600.000.000   | 200 orang   | 600.000.000   | 200 orang   | 600.000.000   | 200 orang   | 600.000.000   | 200 orang                                       | 3.000.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah pendidik yang mengikuti bintek                                   | 0 orang                                  | 0 orang    | 400 orang                             |               | 400 orang   |               | 400 orang   |               | 400 orang   |               | 400 orang   |               | 400 orang                                       |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.2  | Fasilitasi dan pengembangan PAUD                                      | 1. Jumlah Kecamatan yang difasilitasi GOPFKI dan BUNDA PAUD                | 0 Kelompok                               | 0 Kelompok | 21 Kelompok                           | 294.000.000   | 21 Kelompok | 294.000.000   | 21 Kelompok | 294.000.000   | 21 Kelompok | 294.000.000   | 21 Kelompok | 294.000.000   | 21 Kelompok                                     | 1.470.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi                                     | 0 Gugus                                  | 0 Gugus    | 21 Gugus                              |               | 21 Gugus    |               | 21 Gugus    |               | 21 Gugus    |               | 21 Gugus    |               | 21 Gugus  |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah kegiatan Semarak PAUD  | 0 Lomba                                  | 0 Lomba    | 1 Lomba                               |               | 1 Lomba     |               | 1 Lomba     |               | 1 Lomba     |               | 1 Lomba     |               | 1 Lomba   |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI                           | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 46 Lembaga                            |               | 100 Lembaga |               | 100 Lembaga |               | 100 Lembaga |               | 100 Lembaga |               | 100 Lembaga                                     |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.3  | Pendampingan Operasional BOP PAUD                                     | 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD                              | 0 lembaga                                | 0 lembaga  | 760 lembaga                           | 1.420.866.000 | 760 lembaga | 1.420.866.000 | 760 lembaga | 1.420.866.000 | 760 lembaga | 1.420.866.000 | 760 lembaga | 1.420.866.000 | 760 lembaga                                     | 7.104.330.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah pendidik PAUD yang menerima Bantuan Transport                    | 0 guru                                   | 0 guru     | 500 guru                              |               | 500 guru    |               | 500 guru    |               | 500 guru    |               | 500 guru    |               | 500 guru  |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.4  | Penyelenggaraan UNPK Paket A, B dan C                                 | 1. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi                       | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 4 Lembaga                             | 1.695.000.000 | 4 Lembaga   | 1.695.000.000 | 4 Lembaga   | 1.695.000.000 | 4 Lembaga   | 1.695.000.000 | 4 Lembaga   | 1.695.000.000 | 4 Lembaga                                       | 8.475.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi                       | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 30 Lembaga                            |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga                                      |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 3. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi                       | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 60 Lembaga                            |               | 60 Lembaga  |               | 60 Lembaga  |               | 60 Lembaga  |               | 60 Lembaga  |               | 60 Lembaga                                      |                |  |                                 |
|        |         |                   |   | 4. Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning                        | 0 orang                                  | 0 orang    | 20 orang                              |               | 40 orang    |               | 40 orang    |               | 40 orang    |               | 40 orang    |               | 40 orang  |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.5  | Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga            | 1. Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel                    | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 440 Lembaga                           | 250.000.000   | 440 Lembaga | 250.000.000   | 440 Lembaga | 250.000.000   | 440 Lembaga | 250.000.000   | 440 Lembaga | 250.000.000   | 440 Lembaga                                     | 1.250.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Lembaga TBM penerima bantuan  | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga  | 25 Lembaga                            |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga  |               | 30 Lembaga                                      |                |  |                                 |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.6  | Penyelenggaraan UNPK Paket A, B dan C                                 | Jumlah siswa paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN                       | 0 orang                                  | 0 orang    | 1000 orang                            | 350.000.000   | 850 orang   | 350.000.000   | 850 orang   | 350.000.000   | 850 orang   | 350.000.000   | 850 orang   | 350.000.000   | 850 orang                                       | 1.750.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         | 1.1.1.1.1.1.25.7  | Peningkatan mutu sarana prasarana PAUD dan Dikmas                     | 1. Jumlah PAUD yang menerima APE   | 0 PAUD                                   | 0 PAUD     | 35 PAUD                               | 685.000.000   | 88 PAUD     | 685.000.000   | 88 PAUD     | 685.000.000   | 88 PAUD     | 685.000.000   | 88 PAUD     | 685.000.000   | 88 PAUD   | 3.425.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|        |         |                   |   | 2. Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras                       | 0 PAUD                                   | 0 PAUD     | 21 PAUD                               |               | 88 PAUD     |               | 88 PAUD     |               | 88 PAUD     |               | 88 PAUD     |               | 88 PAUD   |                |  |                                 |

| Tujuan | Sasaran   | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                    | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |  |
|--------|---|-------------------|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---|----------------|--|---------------------------------|--|
|        |   |                   |   |  | 2018                                     | 2019               | 2020                                  |               | 2021               |               | 2022               |               | 2023               |               | 2024               |               | Target  | Rp.            |  |                                 |  |
|        |   |                   |   |  | Target                                   | Target             | Target                                | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target             | Rp.           | Target  | Rp.            |  |                                 |  |
| 1      | 2   | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7                  | 8                                     | 9             | 10                 | 11            | 12                 | 13            | 14                 | 15            | 16                 | 17            | 18  | 19             | 20   | 21                              |  |
|        |   |                   |   | 3. Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras                   | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga          | 4 Lembaga                             |               | 5 Lembaga          |               | 5 Lembaga          |               | 5 Lembaga          |               | 5 Lembaga          |               | 5 Lembaga                                       |                |  |                                 |  |
|        |   | 1.1.1.1.1.1.25.8  | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas                    | 1. Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi      | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga          | 75 Lembaga                            | 230.000.000   | 180 Lembaga        | 230.000.000   | 180 Lembaga        | 230.000.000   | 180 Lembaga        | 230.000.000   | 180 Lembaga        | 230.000.000   | 180 Lembaga                                     | 1.150.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   |                   |   | 2. Jumlah lembaga PAud dan Dikmas yang dibina sesuai dengan tupoksi        | 0 Peserta                                | 0 Peserta          | 120 Peserta                           |               | 150 Peserta        |               | 150 Peserta        |               | 150 Peserta        |               | 150 Peserta        |               | 150 Peserta                                     |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 3. Jumlah peserta lomba apresiasi PAud dan Dikmas yang difasilitasi        | 0 orang                                  | 0 orang            | 15 orang                              |               | 15 orang           |               | 15 orang           |               | 15 orang           |               | 15 orang           |               | 15 orang  |                |  |                                 |  |
|        |   | 1.1.1.1.1.1.25.9  | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) | Jumlah penerima BOP Kesetaraan   | 0 Lembaga                                | 0 Lembaga          | 24 Lembaga                            | 836.000.000   | 21 Lembaga         | 836.000.000   | 21 Lembaga         | 836.000.000   | 21 Lembaga         | 836.000.000   | 21 Lembaga         | 836.000.000   | 21 Lembaga                                      | 4.180.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   | 1.1.1.1.1.1.25.10 | Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)                               | Jumlah bantuan yang diterima   | 0 paket                                  | 0 paket            | 1 paket                               | 1.500.000.000 | 1 paket            | 1.500.000.000 | 1 paket            | 1.500.000.000 | 1 paket            | 1.500.000.000 | 1 paket            | 1.500.000.000 | 1 paket   | 7.500.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        | Meningkatnya pengelolaan (periferal, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan |                   |   | Cakupan Pengelolaan Kebudayaan   | 31.44 persen                             | 32.26 persen       | 32.86 persen                          | 3.895.766.000 | 33.31 persen       | 3.895.766.000 | 33.69 persen       | 3.795.766.000 | 34.16 persen       | 3.795.766.000 | 34.60 persen       | 3.795.766.000 | 34.60 persen                                    | 19.178.830.000 |  |                                 |  |
|        |   | 2.16.1.1.1.1.21   | Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan                          | 1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan      | 7.90 Persen                              | 9.48 Persen        | 10.54 Persen                          | 3.895.766.000 | 11.59 Persen       | 3.895.766.000 | 12.64 Persen       | 3.795.766.000 | 13.70 Persen       | 3.795.766.000 | 14.75 Persen       | 3.795.766.000 | 14.75 Persen                                    | 19.178.830.000 |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 2. Persentase Karya Budaya yang Terlayani                                  | 3.44 Persen                              | 3.96 Persen        | 4.12 Persen                           |               | 4.20 Persen        |               | 4.30 Persen        |               | 4.44 Persen        |               | 4.51 Persen        |               | 4.51 Persen                                     |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 3. Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif                              | 82.98 Persen                             | 83.33 Persen       | 83.92 Persen                          |               | 84.13 Persen       |               | 84.14 Persen       |               | 84.34 Persen       |               | 84.54 Persen       |               | 84.54 Persen                                    |                |  |                                 |  |
|        |   | 2.16.1.1.1.1.21.1 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah                            | 1. Jumlah Kelompok Adat Yang Dibina  | 21 Kelompok                              | 21 Kelompok        | 21 Kelompok                           | 740.000.000   | 21 Kelompok        | 740.000.000   | 21 Kelompok        | 740.000.000   | 21 Kelompok        | 740.000.000   | 21 Kelompok        | 740.000.000   | 21 Kelompok                                     | 3.700.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   |                   |   | 2. Jumlah permainan tradisional yang dilestarikan                          | 15 Jenis                                 | 15 Jenis           | 15 Jenis                              |               | 15 Jenis           |               | 15 Jenis           |               | 15 Jenis           |               | 15 Jenis           |               | 15 Jenis  |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 3. Jumlah Naskah Jawa dan Geguritan yang dihasilkan                        | 20 Naskah                                | 20 Naskah          | 20 Naskah                             |               | 20 Naskah          |               | 20 Naskah          |               | 20 Naskah          |               | 20 Naskah          |               | 20 Naskah                                       |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 4. Jumlah Tosan Aji yang dijamas dan dipamerkan                            | 152 Buah                                 | 152 Buah           | 152 Buah                              |               | 152 Buah           |               | 152 Buah           |               | 152 Buah           |               | 152 Buah           |               | 152 Buah  |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 5. Jumlah Upacara Tradisi yang Difasilitasi                                | 21 Upacara Tradisi                       | 21 Upacara Tradisi | 21 Upacara Tradisi                    |               | 21 Upacara Tradisi |               | 21 Upacara Tradisi |               | 21 Upacara Tradisi |               | 21 Upacara Tradisi |               | 21 Upacara Tradisi                              |                |  |                                 |  |
|        |   | 2.16.1.1.1.1.21.2 | Sejarah dan Pelestarian Nilai Tradisi                                     | 1. Jumlah OPK WBTB   | 3 Kelompok                               | 3 Kelompok         | 3 Kelompok                            | 227.327.700   | 3 Kelompok         | 227.327.700   | 3 Kelompok         | 227.327.700   | 3 Kelompok         | 227.327.700   | 3 Kelompok         | 227.327.700   | 3 Kelompok                                      | 1.136.638.500  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   |                   |   | 2. Jumlah peserta penghayat kepercayaan                                    | 11 organisasi                            | 11 organisasi      | 11 organisasi                         |               | 11 organisasi      |               | 11 organisasi      |               | 11 organisasi      |               | 11 organisasi      |               | 11 organisasi                                   |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 3. Jumlah peserta lawatan sejarah  | 90 orang                                 | 90 orang           | 90 orang                              |               | 90 orang           |               | 90 orang           |               | 90 orang           |               | 90 orang           |               | 90 orang  |                |  |                                 |  |
|        |   | 2.16.1.1.1.1.21.3 | Pertunjukan Seni Budaya   | 1. Jumlah Festival   | 4 festival                               | 4 festival         | 4 festival                            | 1.725.000.000 | 4 festival         | 1.725.000.000 | 4 festival         | 1.725.000.000 | 4 festival         | 1.725.000.000 | 4 festival         | 1.725.000.000 | 4 festival                                      | 8.625.000.000  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   |                   |   | 2. Jumlah pertunjukan  | 10 pertunjukan                           | 10 pertunjukan     | 10 pertunjukan                        |               | 10 pertunjukan     |               | 10 pertunjukan     |               | 10 pertunjukan     |               | 10 pertunjukan     |               | 10 pertunjukan                                  |                |  |                                 |  |
|        |   |                   |   | 3. Jumlah Kesenian yang dikirim  | 6 Kelompok                               | 6 Kelompok         | 6 Kelompok                            |               | 6 Kelompok         |               | 6 Kelompok         |               | 6 Kelompok         |               | 6 Kelompok         |               | 6 Kelompok                                      |                |  |                                 |  |
|        |   | 2.16.1.1.1.1.21.4 | Fasilitasi dan Infentarisasi Seni Budaya                                  | 1. Jumlah Kesenian yang didata   | 0 kesenian                               | 0 kesenian         | 100 kesenian                          | 180.000.000   | 100 kesenian       | 180.000.000   | 0 kesenian         | 80.000.000    | 0 kesenian         | 80.000.000    | 0 kesenian         | 80.000.000    | 0 kesenian                                      | 600.000.000    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|        |   |                   |   | 2. Jumlah Film Dokumenter yang dihasilkan                                  | 0 Film                                   | 0 Film             | 3 Film                                |               | 3 Film             |               | 3 Film             |               | 3 Film             |               | 3 Film             |               | 3 Film  |                |  |                                 |  |

| Tujuan        | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |            |                        |            |                        |            |                        |            |                        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |                          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                          |
|---------------|---------|-------------------|---|--|--|-----------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|
|               |         |                   |   |  | 2018                                     | 2019      | 2020                                  |                        | 2021       |                        | 2022       |                        | 2023       |                        | 2024       |                        | Target  | Rp.                      |  |                                 |
|               |         |                   |   |  | Target                                   | Target    | Target                                | Rp.                    | Target     | Rp.                    | Target     | Rp.                    | Target     | Rp.                    | Target     | Rp.                    |   |                          |  |                                 |
| 1             | 2       | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7         | 8                                     | 9                      | 10         | 11                     | 12         | 13                     | 14         | 15                     | 16         | 17                     | 18  | 19                       | 20   | 21                              |
|               |         |                   |   | 3. Jumlah Kesenian yang didokumentasikan                                   | 0 Dokumen                                | 0 Dokumen | 10 Dokumen                            |                        | 10 Dokumen |                        | 10 Dokumen |                        | 10 Dokumen |                        | 10 Dokumen |                        | 10 Dokumen                                      |                          |  |                                 |
|               |         | 2.16.1.1.1.1.21.5 | Perlindungan Benda Cagar Budaya   | 1. Jumlah BCB yang dipelihara  | 0 BCB                                    | 0 BCB     | 949 BCB                               | 360.554.000            | 949 BCB    | 360.554.000            | 949 BCB    | 360.554.000            | 949 BCB    | 360.554.000            | 949 BCB    | 360.554.000            | 949 BCB   | 1.802.770.000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|               |         |                   |   | 2. Jumlah Juru pelihara yang mendapat pembinaan                            | 0 orang                                  | 0 orang   | 90 orang                              |                        | 90 orang   |                        | 90 orang   |                        | 90 orang   |                        | 90 orang   |                        | 90 orang  |                          |  |                                 |
|               |         | 2.16.1.1.1.1.21.6 | Edukasi Berbasis Kebudayaan   | 1. Jumlah peserta kemah budaya   | 0 orang                                  | 0 orang   | 250 orang                             | 212.884.300            | 250 orang  | 212.884.300            | 250 orang  | 212.884.300            | 250 orang  | 212.884.300            | 250 orang  | 212.884.300            | 250 orang                                       | 1.064.421.500            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|               |         |                   |   | 2. Jumlah peserta lomba karya ilmiah                                       | 0 orang                                  | 0 orang   | 80 orang                              |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang  |                          |  |                                 |
|               |         |                   |   | 3. Jumlah peserta edukasi berbasis budaya                                  | 0 orang                                  | 0 orang   | 80 orang                              |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang   |                        | 80 orang  |                          |  |                                 |
|               |         | 2.16.1.1.1.1.21.7 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK Non Fisik) | Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya                        | 0 paket                                  | 0 paket   | 1 paket                               | 450.000.000            | 1 paket    | 450.000.000            | 1 paket    | 450.000.000            | 1 paket    | 450.000.000            | 1 paket    | 450.000.000            | 1 paket   | 2.250.000.000            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| <b>Jumlah</b> |         |                   |   |  |  |           |                                       | <b>199.197.375.000</b> |            | <b>200.178.375.000</b> |            | <b>199.626.875.000</b> |            | <b>200.900.375.000</b> |            | <b>200.958.375.000</b> |   | <b>1.000.861.375.000</b> |  |                                 |